



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 - 2022



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur Kami panjatkan kepada Allah SWT, atas karunia serta ridlho-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Periode Tahun 2017-2022 telah dapat kami susun.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis sebagai turunan dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Rencana Strategis OPD berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana undang-undang tersebut mengamanatkan tentang Urusan Kewenangan Daerah yaitu Urusan Kongkuren yang di dalamnya adalah termasuk urusan Wajib dan Pilihan.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Badan Penghubung tidak termasuk kedalam Urusan Kewenangan Daerah melainkan termasuk dalam urusan penunjang sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Nomor : 83 Tahun 2016 Pasal tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, lampiran V point F .

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah untuk merespon kebijakan yaitu berubahnya Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan terbitnya pengganti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 menjadi No. 10 Tahun 2019

tentang Perubahan RPJMD Tahun 2017 - 2022 dan sebagai wujud melaksanakan kaidah perencanaan.

Rencana Strategis ini adalah sebagai pedoman dan sebagai acuan untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan di Badan Penghubung Daerah yang mengacu pada Tupoksi dan Program Daerah (Janji Kepala Daerah) yang dituangkan ke dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam periode 2017-2022.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Periode Tahun 2017-2022, dan semoga keberadaan dokumen ini dapat membantu dan bermanfaat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Banten khususnya Badan Penghubung Daerah.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, November 2019

**BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI BANTEN
Plt. Kepala Badan**



Ir. TRIASGANI PURBASARI, MM
Pembina
NIP. 19631124 200112 2001

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI BANTEN	I-1
2.1. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi.....	II-1
2.2. Sumber Daya Badan Penghubung	II-10
2.3. Kinerja Pelayanan	II-15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	II-18
BAB III IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN TELAHAH VISI DAN MISI	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-9
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB. VII. KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

LAMPIRAN (Matriks Program dan Kinerja Urusan)

DAFTAR TABEL



Tabel 2.1	Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Penghubung Provinsi Banten Menurut Status dan Golongan Tahun	II - 11
Tabel 2.2	Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Penghubung Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017	II - 11
Tabel 2.3	Daftar Kendaraan Roda 2 (dua) Tahun 2017	II - 13
Tabel 2.4	Daftar Kendaraan Roda 4 (empat) Tahun 2017	II - 13
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan	II - 16
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pelayanan	II - 17
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III- 1
Tabel 3.2	Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan	III - 1
Tabel 4.1	Tujuan Sasaran Jangka Menengah	IV - 4
Tabel 5.2	Strategi dan Arah Kebijakan	V - 1
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan	VI - 1
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Penghubung	VII - 1

DAFTAR GAMBAR



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Banten II - 2

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah yang mendasari tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang data informasi dan tahapan perencanaan yaitu visi, misi, Tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan, Indikator Kinerja, Program, Kegiatan Target dan Capaian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan turunannya yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat
3. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
4. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah.

Peraturan Perundangan undangan ini mengatur tentang Perangkat Kerja dan menjelaskan tentang kelembagaan Badan Penghubung Daerah.

Sebagaimana dalam peraturan perundang undangan tersebut bahwa Badan Penghubung Daerah termasuk Badan Daerah, yang mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi, Badan Penghubung Daerah menurut PP 18 Tahun 2016 termasuk Organisasi Perangkat Daerah Setingkat Eselon III yang berkedudukan di Ibukota Negara yaitu Jakarta untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Badan Penghubung Daerah merupakan Perangkat Daerah Provinsi Banten dibentuk untuk membantu dan memudahkan dalam berkomunikasi dan administrasi antara daerah dengan pusat, Badan penghubung adalah jabatan administrator yang menurut PP 18 Tahun 2016 tidak dilakukan Pemetaan dan skoring besaran kelembagaan, sehingga tidak memiliki tipologi.

Dari penjelasan latar belakang ini bahwa amanat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 151 Ayat 1 yaitu “ Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif “ sedangkan dalam UU NO. 25 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “ Renstra SKPD sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Demikian pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana bunyi pasal 12 bahwa kepala SKPD menyusun rancangan Renstra – SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD serta Renstra – SKPD disampaikan oleh kepala SKPD kepada Bappeda, yang selanjutnya Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan Renstra – SKPD sebagai masukan.

Pada Pokok permasalahan Renstra ini adalah untuk merespon kebijakan yaitu berubahnya Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan terbitnya pengganti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 menjadi No. 10

Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2017 - 2022 dan sebagai wujud melaksanakan kaidah perencanaan.

1.2 DASAR HUKUM

Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Periode Tahun 2017-2022 ini disusun dengan Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi BAnten Tahun 2017 - 2022;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Tipe, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2016 tentang Uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, lampiran V point F.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Renstra Perubahan Ini adalah untuk memberikan arahan dan informasi sekaligus menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dalam menyusun Renja dan sebagai dasar merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yaitu untuk :

1. Tujuan utama perubahan Renstra ini adalah terkait dengan perubahan Perda RPJMD dari Perda Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2019;
2. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah; Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan , Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan dalam kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2017 - 2022 ;
- 2 Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penghubung Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten dan perencanaan penganggaran; Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Banten selama periode tahun 2017 – 2022;
- 3 Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Banten (Rencana Kerja Tahunan);
- 4 Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Badan Penghubung Provinsi Banten baik tahunan maupun lima tahunan.
- 5 Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala Badan Penghubung Daerah atas kinerja Badan selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistematika penyusunan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 yang diatur pada pasal 40 ayat (4) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. [Pasal 37] :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Badan Penghubung Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten
- 2.2. Sumber Daya Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Badan Penghubung

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG DAERAH



2.1. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Badan Penghubung adalah termasuk Badan Daerah, yang mempunyai tugas membantu gubernur untuk melaksanakan fungsi sebagai penunjang Urusan Pemerintahan (Kongkuren) yang menjadi kewenangan daerah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu sebanyak 32 urusan yaitu wajib dan pilihan dengan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bahwa Badan Penghubung Daerah adalah jabatan administrator termasuk Organisasi Perangkat Daerah setingkat Eselon III yang tidak dilakukan Pemetaan, skoring dan besaran kelembagaan, sehingga tidak memiliki tipologi yang berkedudukan di Ibukota Negara (Pusat Pemerintahan).

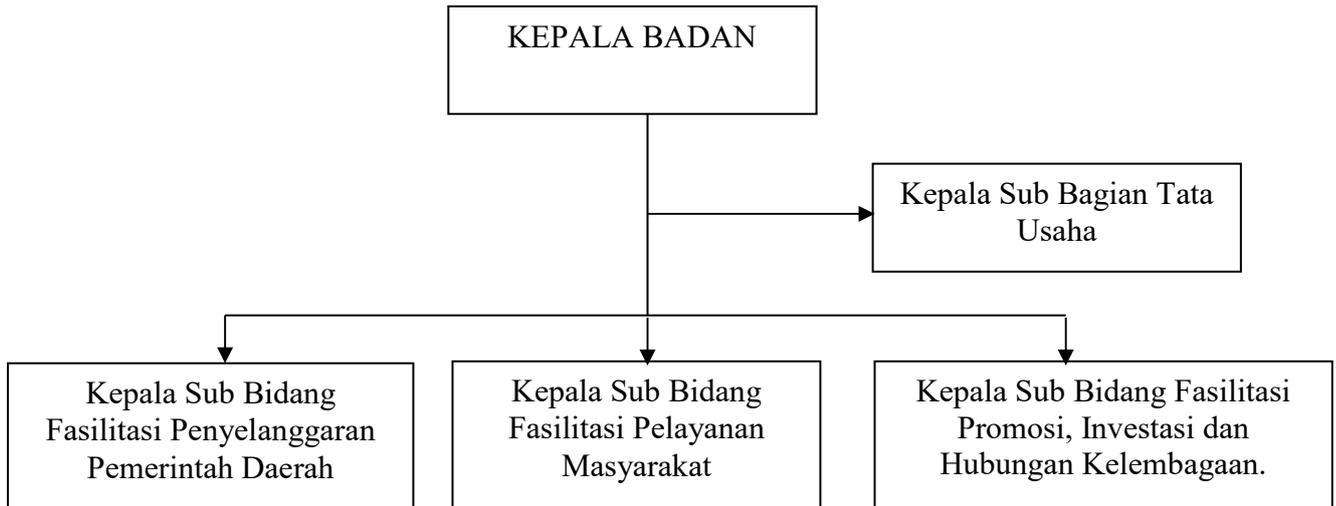
Badan Penghubung Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yaitu untuk memudahkan rentang kendali dan menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, sehingga dapat berperan dalam membantu untuk memudahkan berkomunikasi serta administrasi antara daerah dengan pusat.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten turunannya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten 2016 dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2016 tentang Uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, lampiran V point F terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kepala Sub Bidang Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Kepala Sub Bidang Fasilitas Pelayanan Masyarakat;
5. Kepala Sub Bidang Fasilitas Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan.

Dengan digambarkan struktur organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten secara diagramatis sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Daerah Banten
Setingkat Eselon II a



Badan Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf f Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Badan Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penghubung mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga.

Badan Penghubung dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

1. Pelaksanaan koordinasi, mediasi dan fasilitasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga-lembaga Pusat, Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Sahabat dan Pihak Swasta;
2. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pembinaan masyarakat daerah Provinsi Banten di Jakarta;
4. Pengumpulan data dan informasi serta kegiatan promosi Pemerintah Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang perangkat daerah bahwa berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 bahwa uraian tugas Badan Penghubung adalah sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan Penghubung Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program kerja di lingkungan Badan Penghubung Daerah berdasarkan rencana strategis Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) Membina bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Merumuskan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; 6) Merumuskan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Banten di Jabodetabek dan Mahasiswa Banten di luar Provinsi Banten, Data dan Informasi, Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan;
- 7) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi ketatausahaan umum dan rumah tangga;
- 8) Menyelenggarakan Pengelolaan Anjungan Daerah Banten di Taman Mini Indonesia Indah;
- 9) Menyelenggarakan Pengelolaan Wisma Banten di Jakarta;
- 10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga-lembaga Pusat, Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Sahabat dan Pihak Swasta;
- 11) Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan data;
- 13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Daerah; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Penghubung dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi Badan Penghubung Daerah. b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan program kerja Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyusun bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset di lingkup Badan Penghubung Daerah;
- 7) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi aset badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis Badan Penghubung Daerah, bahan rencana pembangunan jangka menengah daerah lingkup Badan Penghubung Daerah;
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
- 10) Menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan Badan Penghubung Daerah;
- 11) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Badan Penghubung Daerah;
- 12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Penghubung Daerah;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- 14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah a. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Penghubung Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Program Kerja Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyusun bahan rumusan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan menguraikan pokok-pokok petunjuk prosedur dan hubungan kerja sebagai pedoman pelaksanaan;
- 6) Melaksanakan fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah di luar daerah Provinsi Banten serta melaksanakan fasilitasi apabila diminta oleh DPRD Provinsi, Bupati, Walikota, DPRD Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi Banten di Jakarta;
- 7) Melaksanakan fasilitasi Kementerian/lembaga ke Banten;

- 8) Mengoordinasikan kegiatan kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah;
- 9) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan Wisma Banten di Jakarta; 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Sub Bidang Fasilitas Pelayanan Masyarakat a. Kepala Sub Bidang Fasilitas Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Penghubung Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Fasilitas Pelayanan Masyarakat. b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Fasilitas Pelayanan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Fasilitas Pelayanan Masyarakat berdasarkan Program Kerja Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitas Pelayanan Masyarakat;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitas Pelayanan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitas Pelayanan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menginventarisasi, mensistematisasikan, menganalisis dan menyajikan data dan informasi masyarakat Banten se-Jabodetabek dan Mahasiswa Banten di luar Provinsi Banten;

- 6) Melaksanakan Fasilitasi pelayanan masyarakat Banten di Jabodetabek;
- 7) Melaksanakan pembinaan terhadap mahasiswa asal Banten di luar daerah Provinsi Banten;
- 8) Melaksanakan fasilitasi rapat pertemuan mahasiswa Banten di luar daerah Provinsi Banten;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan a. Kepala Sub Bidang Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Penghubung Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan. b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan berdasarkan Program Kerja Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitas Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyusun bahan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan dengan menguraikan pokok-pokok petunjuk prosedur dan hubungan kerja sebagai pedoman pelaksanaannya;
- 6) Mengoordinasikan, menginformasikan dan mengolah data tentang promosi, Investasi, Kelembagaan dan informasi daerah;
- 7) Menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan pertemuan-pertemuan para calon investor baik dalam maupun luar negeri;
- 8) Melaksanakan pengelolaan Anjungan Daerah Banten di Taman Mini Indonesia Indah;
- 9) Memberikan layanan informasi dalam aspek ekonomi, pembangunan sosial, budaya dan pariwisata melalui media cetak dan elektronik;
- 10) Melaksanakan koordinasi promosi potensi daerah dengan Perangkat Daerah terkait, dalam event pameran nasional yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi Banten;
- 11) Melaksanakan dan mengembangkan teknologi informasi (website) dan data base jaringan lingkup Badan Penghubung Daerah;
- 12) Melaksanakan fasilitas pelestarian seni budaya Banten di Anjungan Daerah Banten Taman Mini Indonesian Indah;
- 13) Melaksanakan koordinasi fasilitas promosi kebudayaan dan kesenian Banten yang diselenggarakan di luar daerah Provinsi Banten;
- 14) Mengoordinasikan kegiatan hubungan antar Lembaga Pemerintah, Kementerian/Lembaga, dan Swasta maupun lembaga masyarakat;
- 15) Melaksanakan koordinasi kerjasama pembangunan daerah dengan Lembaga Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga, dan Swasta maupun lembaga masyarakat;
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2 SUMBER DAYA BADAN PENGHUBUNG

2.2.1 Gambaran Umum Dan Komposisi Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hingga tahun 2017, Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten didukung oleh 45 orang pegawai yang terdiri dari 26 orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 22 orang Tenaga Kerja Sementara (TKS). Dari 25 orang pegawai yang berstatus ASN terdistribusi dalam 2 orang pegawai dengan golongan ruang IV, 20 orang pegawai dengan golongan ruang III, serta 4 orang pegawai dengan golongan ruang II.

Berdasarkan jumlah jabatan struktural, hingga tahun 2017 dari 5 eselon yang tersedia telah terisi sepenuhnya, dimana hal ini mencerminkan tugas-tugas pada satuan organisasi telah terdistribusi secara optimal. Hingga tahun 2017, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang membawahi 10 pelaksana yang berstatus ASN, Sub Bidang Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan 4 (empat) orang staf berstatus ASN, Sub Bidang Fasilitas Pelayanan Masyarakat 3 (tiga) orang staf berstatus ASN dan Sub Bidang Fasilitas Promosi 4 (empat) orang berstatus ASN, Kondisi tersebut dirasakan kurang mendukung pencapaian efektifitas terhadap pelaksanaan tugas pada tataran eselon IV, khususnya bila dikaitkan dengan beban tugas yang ada maupun kebutuhan dan keanekaragaman koordinasi, kerjasama dan pembinaan lembaga dan aktifitas promosi daerah yang perlu difasilitasi dan diselenggarakan setiap tahunnya.

Tabel 2.2.1.1
Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Penghubung
Daerah Provinsi Banten Menurut Golongan Ruang Tahun 2017

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH PEGAWAI (Orang)	KET
1	2	3	4
1	IV/E	-	
2	IV/D	-	
3	IV/C	-	
4	IV/B	1	
5	IV/A	2	
6	III/D	5	
7	III/C	2	
8	III/B	7	

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH PEGAWAI (Orang)	KET
9	III/A	5	
10	II/D	2	
11	II/C	1	
12	II/B	1	
13	II/A	-	
14	I/D	-	
15	I/C	-	
16	I/B	-	
17	I/A	-	
	JUMLAH	26	

Dengan keterbatasan jumlah pegawai di lingkungan Badan Penghubung, masih perlunya pengembangan Sumber daya untuk mendukung kinerja teknis Badan Penghubung sehingga diperlukan tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa mendatang, dengan demikian dibutuhkannya peningkatan kompetensi pegawai untuk mendukung peranan Badan Penghubung yang begitu kompleks, baik melalui peningkatan status pendidikan maupun keahlian fungsional, sedangkan pada bidang kesekretariatan diperlukan juga peningkatan kemampuan perencanaan pembangunan, keuangan, kepegawaian, manajerial dan komunikasi.

Pada tahun 2017 Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Penghubung Daerah menurut tingkat pendidikan :

Tabel 2.2.1.2
Jumlah dan Distribusi Pegawai Kantor Penghubung
Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017

NO	TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH PEGAWAI (Orang)	KET
1	2	3	4
1	DOKTORAL (S3)	-	
2	MAGISTER (S2)	4	
3	SARJANA (S1)	18	
4	DIPLOMA/AKADEMI (DIII)	1	
5	SMU/SMK	3	
6	SMP	-	
7	SD	-	
	JUMLAH	26	

2.2.2 Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor yang menjamin kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten. Keberadaan kantor dan Wisma Banten berlokasi di Jalan Tebet Timur Raya No. 51, sedangkan Anjungan Daerah berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah. Kedudukan dan kondisi kantor tersebut dirasakan sangat penting sebagai *front office*, sebagai Duta Banten di Jakarta, etalase, show windows Banten di Jakarta, keberadaan tersebut secara rasional dapat berpengaruh terhadap pencitraan Pemerintah Provinsi Banten di Jakarta sebagai pusat Ibu Kota Negara .

Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten adalah wakil Banten di Jakarta diperlukan kerjasama stakeholders/lembaga Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta.

Keberadaan kantor saat ini, terdiri dari ruang utama yang meliputi ruang kerja 1 (satu) Sub Bag Tata Usaha, 3 Sub Bidang, Ruang Rapat, Media Center, Lobby, 2 toilet, 7 Kamar Wisma lantai 2, Ruang Makan Besement, Toilet, Pantry, Ruang Pimpinan, Mushola, Teras, Gudang, pos satpam, taman, dan termasuk tempat parkir roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) yang memuat 12 (dua belas) kendaraan. Disamping itu, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan, tersedia perpustakaan mini serta perangkat audiovisual (TV, VCD, *in focus*, *handy came*, dan *wireless tape*).

Sebagai daya dukung kelancaran pelaksanaan tugas aparatur, sarana penunjang operasionalnya juga perlu diperhatikan, hal ini dianggap penting karena kelancaran dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mencakup administrasi, kearsipan, perencanaan maupun pelayanan sangat membutuhkan dukungan perangkat komputer, baik yang bersifat hardware maupun software. Di samping itu terdapat pula harapan untuk mengembangkan sistem komputerisasi dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan pada Badan Penghubung Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Banten di masa mendatang.

Berdasarkan kondisi saat ini, jumlah perangkat komputer dan laptop yang tersedia kurang maksimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, dimana bila dibandingkan dengan jumlah pegawai ASN yang berjumlah 26 orang. Dari jumlah sarana yang ada, hampir rata-rata kondisinya sudah kurang baik (rusak), termasuk kondisi printer.

Selanjutnya dalam mendukung kebutuhan mobilisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten dan pelayanan fasilitasi pimpinan, hingga tahun 2017 tersedia sebanyak 9 (sembilan) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) dan 6 (enam) unit kendaraan roda empat (Inova, Toyota Kijang, Avanza, Xenia, Toyota Hlace). Keberadaan kendaraan roda empat, dalam masa-masa tertentu dirasakan kurang mencukupi.

Adapun daftar dan kondisi sarana Kendaraan Dinas aparatur di Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten hingga Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.1
Daftar Kendaraan Roda 2 Sarana dan Prasarana
Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KET
1.	Kendaraan Roda 2 Honda Supra	1	Baik	Tahun 2003
2	Kendaraan Roda 2 Honda NF 125 TD	3	Baik	Tahun 2007
3	Kendaraan Roda 2 Honda Vario	1	Baik	Tahun 2009
4.	Kendaraan Roda 2 Honda Mega Pro	1	Baik	Tahun 2009
5.	Kendaraan Roda 2 Honda EF02N 12M2 A/T	3	Baik	Tahun 2015

Tabel 2.2.2.2
Daftar Kendaraan Roda 4 Sarana dan Prasarana
Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KET
1.	Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang Super KF 83 Long	1	Baik	Tahun 2003
2.	Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang Inova Type E	1	Baik	Tahun 2008
3.	Kendaraan Roda 4 Toyota Avanza Type E	1	Baik	Tahun 2008
4.	Kendaraan Roda 4 Daihatsu Xenia Type R	1	Baik	Tahun 2013
5.	Kendaraan Roda 4 Toyota Hi Ace	1	Baik	Tahun 2014
6.	Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang Inova Type G A/T	1	Baik	Tahun 2016

Anjungan Daerah Banten mencerminkan dan menggambarkan tentang miniature, corak budaya dan seni yaitu : Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon sebagai bentuk keragaman seni dan budaya khas Banten di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Tampilan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan suatu kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia di Jakarta Timur. Area seluas kurang lebih 150 hektar[1] atau 1,5 kilometer persegi ini terletak pada koordinat 6 ° 18'6.8"LS, 106° 53'47.2"BT. Di Indonesia, hampir setiap suku bangsa memiliki bentuk dan corak bangunan yang berbeda, bahkan tidak jarang satu suku bangsa memiliki lebih dari satu jenis bangunan tradisional. Bangunan atau arsitektur tradisional yang dibuat selalu dilatarbetakangi oleh kondisi lingkungan dan kebudayaan yang dimiliki. Di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), menggambarkan suku-suku bangsa yang berada di 33 Provinsi Indonesia. Anjungan Provinsi dibangun di sekitar danau dengan miniatur Kepulauan Indonesia, secara tematik dibagi atas delapan zona; Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Tiap anjungan menampilkan bangunan khas setempat.

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia, yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat 33 provinsi Indonesia yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional, serta menampilkan aneka busana, tarian dan tradisi daerah.

Badan Penghubung Provinsi Banten disamping diberi kewenangan untuk mengelola Anjungan Daerah juga ditugaskan untuk mengisi dan memfasilitasi tampilan seni budaya seluruh daerah di Banten sebagai ajang promosi dan informasi Banten di Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta.

Wisma Banten adalah hasil cita-cita seluruh masyarakat Banten sebagai simbol sarana untuk pelaksanaan kegiatan di Jakarta, wisma Banten disamping sarana tempat peristirahatan pelaksanaan kegiatan di Jakarta juga sebagai potensi penghasil retribusi daerah, lahirnya keberadaan wisma bersamaan dengan keberadaan gedung kantor Penghubung yang berada pada lokasi Jl. Tebet timur Raya Nomor 51 Jakarta Selatan pada tahun 2008.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten 2012-2016

Badan Penghubung adalah termasuk Badan Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan demikian bahwa Badan Penghubung tidak termasuk Urusan Wajib ataupun urusan pilihan. Sebagaimana Misi 1 dalam RPJMD yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Badan Penghubung diwajibkan ikut serta dalam mendukung untuk mensukseskan melalui program kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kantor Penghubung
Provinsi Banten Periode Tahun 2012-2017

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Pengelolaan Sistem Layanan Informasi Promosi di Kantor Penghubung	25,87 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Rasio Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Data dan Informasi Pembangunan	1 Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung Daerah
 Provinsi Banten Periode Tahun 2012 -2017

Program (OUTCAME)	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Tahu ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	356,450,000	286,535,500	365,000,000	681,570,400	872,690,000	356,320,000	233,531,000	363,089,600	573,412,510	856,420,400	100	66	99	84	98		
Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Perkantoran	1,143,550,000	2,265,774,000	2,169,000,000	4,706,570,400	4,058,277,896	1,136,705,746	1,653,150,746	2,096,266,625	4,260,266,625	3,842,392,156	99	145	97	91	95		
Program Pembinaan Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	1,650,000,000	2,067,690,500	2,866,000,000	3,925,716,790	4,168,148,916	1,993,194,600	1,632,399,100	2,590,050,050	3,297,177,983	3,842,392,156	121	99	90	84	92		
Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah		100,000,000	100,000,000	132,588,000	160,000,000		70,787,500	98,679,500	111,306,000	159,556,200	-	71	99	84	100		
Jumlah Anggaran Program Kegiatan Tahun 2012-2017	3,150,000,000	4,720,000,000	5,500,000,000	9,446,445,590	9,259,116,812	3,486,220,346	3,589,868,346	5,148,085,775	8,242,163,118	8,700,760,912	111	114	94	87	94	-	-

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.4.1 Tantangan Badan Penghubung Daerah

Badan Penghubung adalah termasuk Badan Daerah, yang mempunyai tugas membantu gubernur untuk melaksanakan fungsi sebagai penunjang Urusan Pemerintahan (Kongkuren) yang menjadi kewenangan daerah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu sebanyak 32 urusan yaitu wajib dan pilihan dengan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Sebagai Wakil Daerah untuk memudahkan rentang kendali dan menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, sehingga dapat berperan dalam membantu untuk memudahkan berkomunikasi serta administrasi antara daerah dengan pusat, maka Badan Penghubung sesuai tugas pokoknya akan berkontribusi terhadap Visi dan Misi Gubernur dalam Pembangunan Periode Tahun 2017-2022 yaitu pada misi 1 yaitu :

“ Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) “

Dalam kebijakan yang akan dilakukan oleh Badan Penghubung terhadap Misi 1 maka Badan Penghubung sesuai dengan tugas pelayanan yaitu untuk membantu koordinasi Urusan Pemerintah dan Pembangunan di Ibukota Negara dengan tantangan pada periode 2017 - 2022 dalam target RPJMD yaitu :

1. Akan melakukan untuk mendapatkan predikat Nilai SAKIP (LKIP) sesuai target RPJMD
2. Peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan kepuasan masyarakat sesuai target RPJMD

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Akan menjadi rumah singgah masyarakat Banten dan Rumah Singgah dalam rangka dinas Artinya Badan Penghubung akan membantu masyarakat Banten dan membantu Penyelenggaraan Pemda dalam rangka dinas di Ibukota negara yang memerlukan Bantuan Penginapan dan bantuan lainnya yang termasuk dalam tugas dan pokok serta unsur-unsur kewenangan Badan Penghubung;
2. Akan membantu dalam melakukan administrasi dengan Pemerintah Pusat, Kedutaan. Swasta dan lainnya Artinya Badan Penghubung Daerah akan membantu dan membackup dalam dukungan admintrasi, Koordinasi, mediasi, di Jakarta penyelesaiannya berupa mediasi, Sengketa, fasilitasi, ditindaklanjuti oleh Badan Penghubung (terkait dengan kinerjanya)
3. Konsultasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Swasta serta lainnya;
4. Akan menguatkan kerjasama hubungan kelembagaan dengan Kedutaan Besar yaitu membuat (menjalin) Jaringan Informasi, Kerjasama yaitu : Promosi, Pendidikan (Bantuan, Beasiswa dan lainnya), Informasi Tenaga Kerja (WNI/WNA), Pariwisata Investasi, Umroh (Kedutaan Arab) dan lainnya.
5. Akan menguatkan Fungsi Informasi sebagai Pusat Informasi Banten di Ibu Kota Negara (Pusat Pemerintahan) Artinya Badan Penghubung menjadi tempat/Media Informasi berfungsi sebagai penyerap Informasi di Pusat, Daerah dengan mempublikasikan.
6. Akan meningkatkan PAD dari sektor Non PNBP melalui (BLUD) yaitu sewa wisma, sewa tempat usaha dan fungsi lainnya
7. Akan melakukan kerjasama informasi pembangunan melalui pendekatan religius (yang berakhlakul karimah) terhadap Komunitas Masyarakat Banten di Ibu Kota Negara berdasarkan data sebaran masarakat Banten di Ibukota Negara.
8. Badan Penghubung akan membuat/mengusulkan aturan yaitu memfungsikan dan memanfaatkan serta melibatkan OPD Provinsi dan Kabupate/kota serta Stakeholder.

BAB III

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN TELAAHAN VISI DAN MISI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Banten

Badan Penghubung adalah termasuk Badan Daerah, yang mempunyai tugas membantu gubernur untuk melaksanakan fungsi sebagai penunjang Urusan Pemerintahan (Kongkuren) yang menjadi kewenangan daerah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu sebanyak 32 urusan yaitu wajib dan pilihan dengan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Penghubung sebagaimana Peraturan Pemerintah yaitu untuk memudahkan rentang kendali dan menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, sehingga dapat berperan dalam membantu untuk memudahkan berkomunikasi serta administrasi antara daerah dengan pusat.

Badan Penghubung Daerah adalah sebagai wakil daerah di Ibukota Neara (Pusat Pemerintahan) merupakan salah satu fungsi penting untuk mendukung urusan kewenangan daerah di Ibu Kota Negara, namun hingga saat ini fungsi dan peranannya kurang maksimal dan kurang mendapatkan dukungan perhatian, oleh karena itu respon OPD belum menanggapi positif untuk memanfaatkan dan memfungsikan sehingga bisa berdaya guna dan berhasilguna, akibatnya kinerja Badan Penghubung dirasakan belum optimal, adapun beberapa factor penyebab masalah yang dapat mempengaruhi yaitu : Budgeting, Aparatur (SDM) Penghubung, Dukungan (backup), perhatian dan keseriusan dari Pimpinan serta kurang penekanan terhadap OPD Provinsi dan stakeholder untuk memfungsikan dan memanfaatkan Badan Penghubung.

Faktor penghambat dan penyebab sehingga timbul permasalahan yang dapat berpengaruh terhadap target Capaian Kinerja salah satunya yaitu : Budgeting, kurang sasaran (Program Kegiatan), Aparatur (SDM) Penghubung belum maksimal, dukungan (backup) dari semua pihak, perhatian dan keseriusan dari Pimpinan atas kurangnya melakukan penekanan terhadap OPD Provinsi Banten dan stakeholder dalam memfungsikan dan memanfaatkan Badan Penghubung Daerah.

Masalah lain dari Badan Penghubung yaitu kurangnya kerjasama dengan irisan (stakeholder) OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terkesan dan menimbulkan persepsi bahwa Badan penghubung masih tumpang tindih dalam melaksanakan fungsi dan peranannya.

Dari permasalahan tata laksana tersebut Badan Penghubung akan mengefektifkan dan memfungsikan permasalahan yang ada terkait dengan penguatan dan peranan dengan berbagai prosedur yang lebih akuntabel dan transparan antara lain melalui penerapan, yaitu : merubah Indikator Kinerja, menguatkan Sistem Pengembangan Informasi, Penguatan dan Peningkatan kinerja, serta perbaikan regulasi dan prosedur kinerja. Sedangkan di bidang sumber daya manusia perlu dilakukan standardisasi kompetensi dan kajian untuk menduduki suatu Bidang keahlian khususnya terkait dengan Bidang di Badan Penghubung yang sesuai dengan fungsinya yang arahnya melalui struktural dan fungsional.

Dari beberapa permasalahan dan kendala yang ada bahwa faktor utama penyebab kinerja tidak optimal adalah dari tiga aspek yaitu : lembaga, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia, dengan demikian 3 aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap opini atau pandangan dari pihak luar tentang kinerja lembaga.

Dengan demikian yang akan dilakukan oleh Badan Penghubung Daerah Kinerja mendatang dan seterusnya yang mengacu pada Rencana Strategis bahwa Badan Penghubung akan melakukan Inovasi sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan undang undang turunannya dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yaitu dengan peningkatan pelayanan publik dengan langkah-langkah melalui : penguatan dan penajaman Indikator Kinerja Output sehingga keinerja outcam Badan Penghubung dapat terukur.

Esensi dari permasalahan tersebut adalah pemahaman tentang fungsi dan manfaat Badan Penghubung, Eksistensi dan keberadaan Badan Penghubung tidak lepas dari campur tangannya pimpinan di dalam meningkatkan peran dan fungsi Badan Penghubung, oleh sebab itu sangat besar sekali pengaruhnya apabila pimpinan memberikan penekanan terhadap OPD Provinsi Banten, Kabupaten/Kota dan staekhoder untuk memfungsikan dan memanfaatkan Badan Penghubung Daerah.

Dari permasalahan tersebut ada beberapa kelemahan yang dilakukan oleh Badan Penghubung yaitu fungsi utama sebagai penunjang terabaikan sedangkan fungsi lainnya lebih diprioritaskan penanganannya. Dari permasalahan tersebut sering kali dirasakan dalam tahapan pembahasan perencanaan kegiatan tahunan, penyebabnya adalah kurangnya pemahaman dan informasi aparatur

Badan Penghubung tentang kaidah perencanaan, oleh sebab itu kegiatan yang dilakukan terkesan tidak efektif dan belum dirasakan hasilnya.

Kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan selama ini salah satunya adalah kurangnya pengawasan melekat/SPIP dan pendelegasian tugas dan kewenangan dari pimpinan ke bawahan yang kurang terarah sehingga ada pengaruhnya pada kualitas hasil kegiatan, hirarkinya mekanisme pelaksanaan kegiatan arahnya dari pimpinan ke bawahan dan sebaliknya, adapun factor penyebab lain adalah kurang harmonisnya diantara aparatur yang ada dalam berkomunikasi, factor lain aparatur yang ada kurang berinovasi, serta budaya kerja belum mengacu dan menggunakan Standal Operasional Prosedur (SOP) serta penyebab lainnya adalah kurangnya kerjasama antar Bidang dan Personal.

Kinerja tidak optimal adanya suatu masalah yang belum terselesaikan, permasalahan itu sendiri merupakan kondisi atau situasi yang dapat menghambat individu atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah di harapkan/tetapkan, permasalahan bisa terjadi karena diakibatkan dari beberapa factor internal ataupun factor eksternal sehingga masalah akan jadi problem berkepanjangan apabila tidak ditindaklanjuti/diselesaikan oleh pelaku/pelaksananya.

Permasalahan karakteristiknya internal Badan Penghubung yang berdasarkan pada beberapa objek kinerja yang dipandang kurang efektif sehingga terjadi permasalahan dan terindikasi yang berdampak pada capaian kinerja OPD Badan adalah :

Tabel III.1

Permasalahan Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Tahun 2017 sd 2019

No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja 2017	Indikator Kinerja 2018	Indikator Kinerja 2019	Permasalahan	Solusi Permasalahan
1.	Program Tata Kelola Pemerintahan					
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan Kapasitas Aparatur	1) Aparatur yang ada belum berkompeten dalam menangani permasalahan kinerja, kemampuan dan kompetensi pelaksana Badan Penghubung sangat bervariasi namun profesionalitas belum terjamin dan belum terukur; 2) Pelaksanaan Kinerja kurang fokus karena belum memahami tugas fungsi dan peranan Badan Penghubung sebenarnya;	1) Dimasa akan datang perlu diusulkan Aparatur yang berkompeten yang memiliki kemampuan teknis khusus di bidangnya masing-masing agar lebih profesional yang terjamin dan terukur juga diperlukan bimbingan, pembinaan ataupun diklat
	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Belum Teranggarakan	Belum Teranggarakan	Belum Terangarkan	3) Pengelolaan arsip, dokumentasi serta informasi tidak dapat dilakukan dengan baik. (Good Governance and Clean Government).	Diperlukan untuk kegiatan anggaran untuk penatausahaan dan pengelolaan arsip dan dokumen sesuai standar
		Belum ada SOP	Belum semua ada SOP	Belum semua ada SOP	4) Pelaksanaan Kinerja belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan; 5) Belum ada SOP yang baku terkait Pelayanan Masyarakat	Pelaksanaan kinerja Badan Penghubung akan menerapkan seluruhnya Standar Operasional Prosedur, untuk memudahkan bahan evaluasi dan pelaporan
	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Belum ada Pengadaan Sarana Prasaran Kantor yang sifatnya strategis	Belum ada Pengadaan Sarana Prasarana yang sifatnya strategis	Belum ada Pengadaan Sarana Prasarana yang sifatnya strategis	6) Belum memadainya dukungan prasarana dan sarana Badan Penghubung;	7) Badan Penghubung Daerah akan mengusulkan perencanaan pengembangan Sarana dan Prasarana sebagai alat dukung kinerja Badan Penghubung dan Kinerja OPD Provinsi, Kabupaten/Kota di Ibukota

						Negara.
	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kajian Badan Penghubung	Tidak ada kajian	Tidak ada Kajian	8) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah.	Sudah mengusulkan perubahan SOTK yaitu untuk memaksimalkan kinerja dan meratakan fungsi masing masing subid, sehingga lebih berkinerja dan terukur pada tahun 2018 ke Biro Organisasi
		Forum Renja	Forum Renja	Forum Renja	9) Belum Optimal dan belum memadainya penerapan perencanaan pembangunan partisipatif melalui Forum Renja OPD.	Pelaksanaan Forum OPD Badan Penghubung akan menerapkan RENCANA kerja strategis yang dilakukan bersinergi dengan Stakeholder
		Tidak ada usulan regulasi	Tidak ada usulan regulasi	Tidak ada usulan regulasi	Belum optimalnya peran dan fungsi Badan Penghubung sebagai penunjang penyelenggara pemerintahan;	Akan mengusulkan regulasi untuk penguatan peranan Badan Penghubung Daerah di Ibukota Negara
2.	Program Pembangunan Keitraan					
	Kegiatan Promosi, Investasi dan Hubungan Kelambagaan	1. Promosi Fasilitasi Pentas seni di Anjungan Daerah 2. Partisipasi dalam rangka HUT Banten 3. Promosi Event Nasional dan Regional	1. Promosi Fasilitasi Pentas seni di Anjungan Daerah 2. Partisipasi dalam rangka HUT Banten 3. Promosi Event Nasional dan Regional	1. Promosi Fasilitasi Pentas seni di Anjungan Daerah 2. Partisipasi dalam rangka HUT Banten 3. Promosi Event Nasional dan Regional	10) Belum Optimalnya kerja Tim Promosi yaitu : Pameran, Event dan Promosi dengan OPD Provinsi , Kabupaten/Kota dan Stakeholder ;	5) Sudah ada Tim Promosi yang melibatkan beberapa OPD dan dibentuk sesuai dengan SK Gubernur tapi dalam pelaksanaannya belum optimal
		Pengelolaan Media Informasi	Pengelolaan Media Informasi	Pengelolaan Media Informasi	6) Belum terbangunnya jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih sinergis, kontinyu dan saling menguntungkan.	Akan membuat Jaringan kerja di Ibukota Nagara dan Daerah yaitu Provinsi Banten, Kabupaten/Kota dan Badan Penghubung Daerah seIndonesia
					11) Badan Penghubung sebagai Pusat Informasi Banten di Jakarta berfungsi sebagai media informasi tentang pembangunan Banten, informasi tentang OPD Banten dan pemerintah Pusat; 12) Belum maksimalnya peranan Anjungan Daerah Banten di Taman Mini Indonesia Indah;	Badan Penghubung akan meningkatkan Peranannya di Ibukota Negara yaitu : 1. Sebagai rumah singgah 2. Pusat Informasi 3. Akan memaksimalkan peranan promosi di anjungan 4. Akan mengusulkan jabatan fungsional Destinasi di Badan Penghubung terkait dengan tugas fungsinya

					<p>13) Masih adanya kekurangan tenaga ahli untuk bidang-bidang pekerjaan tertentu dalam mendukung Kinerja Badan Penghubung ;</p> <p>14) Belum terbentuknya Tim Destinasi Teknis/Jabatan Fungsional Promosi Wisata dan Investasi Banten di Jakarta,</p>	<p>5. Akan menguatkan kerjasama informasi dan koordinasi ke tiap lembaga terkait di Ibukota negara</p>
		Alat keragaan promosi belum maksimal blm sesuai standar	Alat keragaan promosi belum maksimal blm sesuai standar	Alat keragaan promosi belum maksimal blm sesuai standar	<p>15) Alat keragaan promosi belum terdukung yang memadai, baik yang diproduksi sendiri maupun dari Pemerintah Kabupaten dan Kota;</p>	<p>16) Akan melengkapi alat kelengkapan peraga promosi dengan dukungan stakeholder dan dukungan anggaran untuk memperkuat promosi di Ibu Kota negara</p>
	Kegiatan Pelayanan Masyarakat	<p>1. Sarasehan MAsyarakat BAnten se-Jabodetabek</p> <p>2. Pembinaan Mahasiswa dan Kongres Mahasiswa</p> <p>3. Kerjasama Kreatifitas Mahasiswa Banten</p>	<p>1) Fasilitasi Rakor Mahasiswa</p> <p>2) Sarasehan Masyarakat Banten</p> <p>3) Fasilitasi Pembinaan Masyarakat AsSal Banten</p>	<p>4) Pelayanan Terhadap Masyarakat di Jakarta</p> <p>5) Sarasehan Masyarakat Banten</p> <p>6) Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Asal Banten</p>	<p>17) Belum terbina dan belum diberdayakannya komunitas masyarakat Banten oleh Badan Penghubung yang ada di Jakarta</p>	<p>18) Akan memetakan dan sebaran data informasi sebagai bahan pendukung data sectoral komunitas masyarakat Banten di Ibukota Negara</p>

Aspek penting dalam pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dari tiga aspek yaitu :

- 1) Kelembagaan : pelayanan public dan Penguatan Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Informasi masih menjadi kendala utama.
- 2) Di bidang ketatalaksanaan, Badan Penghubung akan menyederhanakan memfungsikan permasalahan yang ada terkait dengan penguatan dan peranan dengan berbagai prosedur yang lebih akuntabel dan transparan antara lain melalui penerapan sistem Pengembangan informasi penguatan dan peningkatan, serta perbaikan regulasi dan prosedur kinerja.
- 3) Sedangkan di bidang sumber daya manusia perlu dilakukan standardisasi kompetensi dan kajian untuk menduduki suatu Bidang keahlian khususnya terkait dengan Bidang di Badan Penghubung yang sesuai dengan fungsinya yang arahnya melalui structural dan fungsional.

Dari beberapa permasalahan dan kendala yang ada bahwa factor utama penyebab target kinerja tidak optimal adalah dari tiga aspek yaitu lembaga, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia, dengan demikian 3 aspek yang ada sangat berpengaruh terhadap opini atau pandangan dari pihak luar tentang kinerja lembaga.

Sedangkan dalam kesempatan kunjungan kerja dan pertemuan dengan pimpinan yaitu Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda periode sebelumnya Badan Penghubung sangat dibutuhkan keberadaannya untuk membackup penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jakarta dan pelayanan pimpinan, disamping kinerja lainnya, sedangkan dalam kunjungan kerja Sekda Pada Tahun 2019 bahwa badan penghubung perlu ada penguatan fungsi dan peranan dan indicator kinerja khususnya peranan peningkatan kemitraaan dan meningkatkan konsolidasi, koordinasi dengan melakukan kerjasama yang strategis dengan Kedutaan Besar, KePusat menterian dan Pihak Swasta di Ibu Kota Negara (Pusat Pemerintahan) yaitu Jakarta.

Masalah lain dari Badan Penghubung yaitu kurangnya kerjasama dengan irisan (stakeholder) OPD Provinsi yang terkesan tumpang tindih lebih kepada urusan dan penunjang.

Dari Permasalahan yang terjadi sehingga berdampak pada tugas dan fungsi utama yaitu pelayan publik sebagai penunjang urusan sebagaimana tugas pokok Badan Penghubung maka permasalahan utama Badan Penghubung sesuai dengan kinerja pelayanan yaitu :

1. Keluhan masyarakat Banten terkait dengan biaya hidup di Jakarta menunggu pasien rawat inap keluarga, bantuan dan layanan masyarakat di Jakarta dan keluhan untuk membantu dalam rangka dinas di Ibukota negara yang memerlukan Bantuan Penginapan dan bantuan lainnya;
2. Keluhan OPD untuk difasilitasi mengenai administrasi dengan Pemerintah Pusat, Kedutaan. Swasta dan lainnya Artinya Badan Penghubung Daerah harus membantu dan membackup dalam dukungan admintrasi, Koordinasi, mediasi, di Jakarta penyelesaiannya berupa mediasi, Sengketa, fasilitasi, ditindaklanjuti oleh Badan Penghubung (terkait dengan kinerjanya)
3. Keluhan OPD untuk mensupport dan membantu Konsultasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Swasta serta lainnya;
4. Kurangnya kerjasama hubungan kelembagaan dengan Kedutaan Besar terkait tentang Jaringan Informasi, Kerjasama yaitu : Promosi, Pendidikan (Bantuan, Beasiswa dan lainnya), Informasi Tenaga Kerja (WNI/WNA), Pariwisata Investasi, Umroh (Kedutaan Arab) dan lainnya.
5. Kurangnya dukungan Informasi di Ibu Kota Negara (Pusat Pemerintahan)
6. Kurang maksimalnya dukungan fasilitasi untuk peningkatkan PAD dari sektor Non PNBPN melalui (BLUD) yaitu sewa wisma, sewa tempat usaha dan fungsi lainnya
7. Kurangnya kerjasama informasi pembangunan dengan Komunitas Masyarakat Banten di Ibu Kota Negara berdasarkan data sebaran masarakat Banten di Ibukota Negara.
8. Belum maksimalnya Badan Penghubung untuk mebantu dan melibatkan OPD Provinsi dan Kabupaten/kota serta Stakeholder.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025, bahwa RPJMD 2012 – 2017 merupakan tahap akselerasi – I dengan fokus pembangunan yang diprioritaskan pada 7 lingkup.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap Opd wajib menyusun Perencanaan Pembangunan (Renstra), lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada kebijakan dan kewenangan daerah yaitu provinsi, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten sejalan dengan Gubernur baru dan Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk.

Merujuk pada kerangka pemahaman Rencana pembangunan jangka panjang Nasional, RPJPN tahun 2005 – 2025, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 serta mengakselerasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional , RPJMN Tahun 2015-2019, mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, kearifan lokal yang menjunjung tinggi konsep iman dan Taqwa dalam implementasinya Akhlaq karimah maka perlu diwujudkan suatu kondisi masyarakat yang dinamis, masyarakat yang maju dan berdaya saing, sehingga dirumuskan dalam Visi, yaitu menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan, dalam Visi pembangunan Provinsi Banten yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2017-2022), yaitu:

VISI :
BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN
BERAKHLAQUL KARIMAH.

Provinsi Banten yang Maju berarti adanya perubahan dan kondisi semula ke arah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang menerapkan prinsip – prinsip good governance.

Beberapa indikator-indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah: adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/kota), dan adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Provinsi Banten yang Mandiri mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Beberapa indikator Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah.

Provinsi Banten yang Berdaya Saing berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainnya. Beberapa parameter berdaya saing ini, berupa kemudahan, fasilitasi dan daya tarik investasi di Provinsi Banten seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah dan berkepastian hukum, sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketersediaan energi.

Provinsi Banten yang Sejahtera berarti kemampuan daerah dalam mengelola aspek manusia yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa parameter Sejahtera, diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pencapaiannya melalui kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator pendidikan, pencapaian indikator kesehatan, dan pencapaian indikator daya beli masyarakat.

Provinsi Banten yang Akhlakul Karimah berarti harapan daerah dalam menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia beserta alam seisinya.

Beberapa parameter akhlakul karimah ini, tingkat kerukunan umat beragama pada masyarakat, implementasi terhadap rumusannya pada lingkungan aparatur pemerintahan daerah, dan lingkungan pendidikan dengan partisipasi tokoh masyarakat dan alim ulama di Provinsi Banten.

MISI

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Disamping untuk mencapai visi Kepala Daerah Misi juga sebagai arah kebijakan untuk melaksanakan urusan kewenangan daerah yang merupakan amanat undang-undang 23 Tahun 2014 yaitu 32 Urusan Kongkuren Wajib dan pilihan, dari lima misi pembangunan dalam Periode Tahun 2017 - 2022 Badan Penghubung akan melaksanakan Misi ke-1 yaitu :

“ Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) “

Dengan 2 Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien;
2. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung

Adapun Program yang akan dilaksanakan untuk mendukung 2 sasaran sehingga Misi yang ke -1 yaitu dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN



Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangkawaktu siklus perencanaan. Tujuan berdasarkan rumusan Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah :

“ Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya apatur yang berintegritas, berkompentensi dan melayani masyarakat “

Sedangkan Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah : **“ Meningkatkan, support dukungan Koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan Masyarakat di Ibukota Negara”.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Dengan demikian tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau berhasil. Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten berdasarkan rumusan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien.** Hal tersebut diukur dari capaian Laporan Kinerja pemerinah Provinsi Banten.
2. **Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung.** Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penghubung Daerah beserta indikator kinerja secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penghubung :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RPJMD: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel, dan sumberdaya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5
1	Badan Penghubung Daerah : Meningkatnya, support dukungan Koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan Masyarakat di Ibukota Negara	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Nilai)	Nilai	CC	B	BB	BB	A	A
		Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung	Capaian Pelayanan Publik	Persen (%)	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



Strategi merupakan suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi. Strategi jangka menengah RPJMD Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat.

Strategi Badan Penghubung Daerah : **Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Penghubung Daerah**

2. Meningkatkan Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Strategi Badan Penghubung Daerah : **Meningkatnya Koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan dan meningkatkan koordinasi terhadap Mitra Strategis di Ibukota Negara.**

Sedangkan Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome. Arah kebijakan jangka menengah RPJMD Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan.

Arah kebijakan Badan Penghubung Daerah : **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik pada Badan Penghubung Daerah**

2. Peningkatan Koordinasi, mediasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan.

Arah kebijakan Badan Penghubung Daerah ; Peningkatan Koordinasi, mediasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan terhadap Mitra Strategis di Ibukota Negara masyarakat

RENSTRA Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Revisi), Strategi dan kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten dalam lima tahun mendatang, dalam tabel secara rinci pada tabel berikut.

Tabel V.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022

VISI : Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah			
Misi: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya, suport dukungan Koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan Masyarakat di Ibukota Negara	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Penghubung Daerah	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik pada Badan Penghubung Daerah
	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung	Meningkatnya Koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan dan meningkatkan koordinasi terhadap Mitra Strategis di Ibukota Negara	Peningkatan Koordinasi, mediasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan terhadap Mitra Strategis di Ibukota Negara

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Rencana Program dan Kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten untuk tahun 2017-2022 terdiri dari prioritas yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Pembangunan Kemitraan dan Tata Kelola Pemerintahan yang berkolerasi dengan reformasi birokrasi dalam mewujudkan misi ke-1 yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan salah satu program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada periode tahun 2017-2022 hasil identifikasi dan berdasarkan program prioritas dan tugas pokok Badan Penghubung Daerah pada periode pembangunan Tahun 2017- 2022 akan focus dalam 5 Tahun ke depan yaitu :

- 1 Akan menerapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan; dan Mengoptimalkan kerja Tim yaitu : Pameran, Event dan Promosi dengan OPD Provinsi , Kabupaten/Kota dan Stakeholder ;
- 2 Membangun jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih sinergis dan strategis dengan menguatkan kerjasama hubungan kelembagaan dengan Kedutaan Besar, Kementerian, Lembaga, swasta;
- 3 Akan Meningkatkan fungsi pelayanan publik yaitu pelayanan masyarakat dan pimpinan;
- 4 Akan menjadi rumah singgah masyarakat Banten dan Rumah Singgah dalam rangka dinas;

- 5 Akan membantu dalam melakukan administrasi dengan Pemerintah Pusat, Kedutaan. Swasta dan lainnya Artinya Badan Penghubung Daerah akan membantu dan membackup dalam dukungan admintrasi, Koordinasi, mediasi, di Jakarta penyelesaiannya berupa mediasi, Sengketa, fasilitasi, ditindaklanjuti oleh Badan Penghubung (terkait dengan kinerjanya);
- 6 Akan meningkatkan fungsi Konsultasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Swasta serta lainnya dengan menguatkan Fungsi support Informasi di Ibu Kota Negara (Pusat Pemerintahan) Artinya Badan Penghubung menjadi tempat/Media Informasi berfungsi sebagai penyerap Informasi di Pusat, Daerah;
- 7 Akan meningkatkan PAD dari sektor Non PNBPN melalui (BLUD) yaitu sewa wisma, sewa tempat usaha dan fungsi lainnya
- 8 Akan melakukan kerjasama informasi pembangunan melalui pendekatan religius (yang berakhlakul karimah) terhadap Komunitas Masyarakat Banten di Ibu Kota Negara berdasarkan data sebaran masarakat Banten di Ibukota Negara.

Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*) Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten yang akan dilaksanakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun, selaras dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Program, Indikator Kinerja Program (Outcome), Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Berdasarkan Tahun 2017-2022

PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAM)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
(1)		(2)	(3)	(4)
1	TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi Program Kegiatan dan Kaidah Perencanaan yang tepat waktu
			2 Penyediaan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Sektor Penghubung
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	3 Penyediaan Barang Jasa Perkantoran	Tersediannya Barang Jasa, Perkantoran
			4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersediannya Sarana Prasarana Kantor sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
			5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD)

PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAM)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
(1)		(2)	(3)	(4)
			6 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	7 Peningkatan Kapasitas Aparatur	Meningkatkan Kapasitas Aparatur sesuai Standar ASN
		Persentase terwujudnya akuntabilitas penatausahaan keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	8 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Neraca Aset	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang tepat waktu
2	PEMBANGUNAN KEMITRAAN	Indeks Respon Positif Stakeholder Terhadap Informasi Pembangunan di Ibu Kota Negara (Satuan: indeks)	9 Kegiatan Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan	Terselenggaranya Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan di Ibukota Negara
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan di Ibu Kota Negara dan di Wilayah Jabodetabek (Satuan: Indeks)	10 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sesuai standar aturan/SOP
		Persentase Respon Positif Pelayanan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Ibu Kota Negara (Satuan: %)	11 Kegiatan Pelayanan Masyarakat	Terlayanannya Masyarakat Banten di Ibukota Negara sesuai standar aturan/SOP

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Penghubung Daerah Tahun 2017-2022, Terlampir dalam tabel 6.2.

BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten menunjukkan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Indikator Kinerja Utama atau variabel utama kinerja yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja makro Provinsi Banten sebagai variabel yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit kerja Badan Penghubung Daerah dan merupakan core business Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten adalah Capaian Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penghubung Daerah selaku pelaksana program Pembangunan Kemitraan dengan indikator program yaitu :

- Indeks Respon Positif Stakeholder Terhadap Informasi Pembangunan di Ibu Kota Negara;
- Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan di Ibu Kota Negara dan di Wilayah Jabodetabek;
- Persentase Respon Positif Pelayanan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Ibu Kota Negara.

Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Nilai)	Nilai	CC	B	BB	BB	A	A	A
2	Capaian Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program Badan Penghubung Daerah Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Tata Kelola Pemerintahan								
1.1	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skala	2,50	2,80	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1.2	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2 Program Pembangunan Kemitraan									
2.1	Indeks Respon Positif Stakeholder Terhadap Informasi Pembangunan di Ibu Kota Negara	Indek				4	4	4	4
2.2	Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan di Ibu Kota Negara dan di Wilayah Jabodetabek	Indek				4	4	4	4
2.3	Persentase Respon Positif Pelayanan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Ibu Kota Negara	%				100	100	100	100
	Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis	%	100	100	100				100

Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

Definisi operasional IKU Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten mengacu kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, disesuaikan dengan dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Banten Tahun 2017-2022, **sebagaimana dalam lampiran tabel 7.3.**

BAB VIII PENUTUP



Perubahan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Periode Tahun 2017-2022 ini sudah diselaraskan dengan restrukturisasi dan menyesuaikan Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Indikator Kinerja yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2017-2022.

Maksud dari Penyusunan Renstra Perubahan Ini adalah untuk memberikan arahan dan informasi kaitannya dengan perubahan ini sekaligus menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dalam menyusun Renja dan sebagai dasar merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tujuan penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yaitu untuk :

1. Melaksanakan perubahan Tujuan, Strategi dan kebijakan , Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan dalam kebijakan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2017 - 2022 ;
- 1 Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penghubung Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten dan perencanaan penganggaran; dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Banten selama periode tahun 2017 – 2022;
- 2 Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Banten (Rencana Kerja Tahunan);

- 3 Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Badan Penghubung Provinsi Banten baik tahunan maupun lima tahunan.
- 4 Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala Badan Penghubung Daerah atas kinerja Badan selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Demikian Perubahan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang dapat tersusun diharapkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung pada setiap tahunnya, kami sangat menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyajian data Renstra ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang sifatnya membangun dalam penyempurnaan Renstra ini, sehingga dalam pelaksanaannya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dapat di capai.

Tabel 7.3
Lampiran Indikator Kinerja Urusan

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)					
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat					
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien					
Badan Penghubung					
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program			
I.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten	Nilai yang menunjukkan capaian SAKIP OPD, khususnya Badan Penghubung Daerah Provins Banten		Kepala Badan Penghubung Daerah

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Badan Penghubung

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan			Penanggung Jawab	
				No	Komponen	Bobot		Sub Komponen
				1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).	
				2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)	
				3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)	
				4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)	
				5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)	
					Total	100%		

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)					
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat					
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien					
Badan Penghubung					
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
I.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Alat ukur keberhasilan capaian penyediaan dokumen data PEP perangkat daerah</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah dok PEP realisasi tahun n}}{\text{Jumlah dok PEP target tahun n}} \times 100\%$ <p>Dokumen PEP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dok. Laporan Evaluasi Kinerja 2. Dok. Perencanaan Program dan Kegiatan 3. Dok. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 4. Dok. Monitoring dan Evaluasi 5. Dok. Penyediaan data sektoral 	Kasubag Tata Usaha
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Capaian dukungan sarana prasarana administrasi perkantoran pada Perangkat Daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Alat ukur keberhasilan capaian dukungan sarana prasarana administrasi perkantoran pada Perangkat Daerah</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah dukungan sarana dan prasarana adm kantor realisasi tahun n}}{\text{Jumlah dukungan sarana dan prasarana adm kantor target tahun n}} \times 100\%$ <p>Dukungan Sarana Administrasi Perkantoran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Penyediaan barang dan jasa perkantoran 2. Dukungan Pengadaan sarana dan prasarana kantor 3. Dukungan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 4. Dukungan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 5. Dukungan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 	

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)					
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat					
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien					
Badan Penghubung					
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Capaian kompetensi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Alat ukur keberhasilan capaian kompetensi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah dokumen laporan peningkatan kompetensi aparatur tahun n}}{\text{Jumlah dokumen laporan peningkatan kompetensi target tahun n}} \times 100\%$	
		Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Alat ukur keberhasilan capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah laporan pengelolaan keuangan realisasi tahun n}}{\text{Jumlah laporan pengelolaan target tahun n}} \times 100\%$ <p>Dokumen Laporan Keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dok. Laporan Penatausahaan dan Realisasi Keuangan 2. Dok. Laporan Pajak 3. Dok. Laporan TLHP 	

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)																							
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat																							
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien																							
Badan Penghubung																							
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab																		
II.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung	Capaian Pelayanan Publik	Persentase Capaian Pelayanan Publik : Jumlah layanan Urusan dibagi dibagi jumlah urusan di ibukota negara	1) Indikator : jml lembaga yang dilayani dibagi jml lembaga : $\frac{\sum \text{Jumlah layanan urusan di Ibukota Negara dan Jabodetabek}}{\sum \text{Jumlah urusan di Ibukota Negara}} \times 100$	Kepala Badan Penghubung Daerah																		
		Indikator Program :			Kepala Badan																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik di Ibu Kota Negara	Indeks Respon Positif Stakeholder Terhadap Informasi Pembangunan di Ibu Kota Negara (Satuan: indeks)	indeks yang mengukur kesan, Persepsi, ataupun pandangan Mitra Strategis terhadap Hasil Program Kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner, angket dan website Badan Penghubung dengan menggunakan pendekatan Anholt Skala 1 sd 5	Alasan Pemilihan Indikator: Alat ukur keberhasilan capaian Pelayanan Informasi Pembangunan <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Interval</th> <th>Kategori Indeks</th> <th>Skala Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – 20</td> <td>Sangat Buruk</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>21 – 40</td> <td>Buruk</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>41 – 60</td> <td>Cukup Baik</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>61 – 80</td> <td>Baik</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>81 – 100</td> <td>Sangat Baik</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cara penghitungan interval:</p>	Interval	Kategori Indeks	Skala Indeks	0 – 20	Sangat Buruk	1	21 – 40	Buruk	2	41 – 60	Cukup Baik	3	61 – 80	Baik	4	81 – 100	Sangat Baik	5	
Interval	Kategori Indeks	Skala Indeks																					
0 – 20	Sangat Buruk	1																					
21 – 40	Buruk	2																					
41 – 60	Cukup Baik	3																					
61 – 80	Baik	4																					
81 – 100	Sangat Baik	5																					

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)					
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat					
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien					
Badan Penghubung					
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
				Interval = Nilai Skala Indeks x Jumlah Responden Formulah Perhitungan : Setiap sebulan sekali akan dilakukan pengisian kuesioner Penilaian kinerja (oleh masyarakat) di Website Badan Penghubung berupa (tabel skala Indek) serta setiap pelaksanaan kegiatan yang langsung (objek kegiatan) dengan menggunakan angket penilaian kepuasan masyarakat diakumulasi setiap bulannya menjadi realisasi target tahunan	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan di Ibu Kota Negara dan di Wilayah Jabodetabek (Satuan: Indeks)	indeks yang mengukur kesan, Persepsi, ataupun pandangan, Layanan Pimpinan yang dilakukan oleh Badan Penghubung Daerah Pemerintah Provinsi Banten dengan menggunakan kuesioner, angket	Alasan Pemilihan Indikator: Alat ukur keberhasilan capaian yaitu Terlayannya Pelayanan Pimpinan	

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Badan Penghubung

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan			Penanggung Jawab
				Interval	Kategori Indeks	Skala Indeks	
			dan website Badan Penghubung dengan menggunakan pendekatan Anholt Skala 1 sd 5	0 – 20	Sangat Buruk	1	
				21 – 40	Buruk	2	
				41 – 60	Cukup Baik	3	
				61 – 80	Baik	4	
				81 – 100	Sangat Baik	5	
				<p>Cara penghitungan interval:</p> <p>Interval = Nilai Skala Indeks x Jumlah Responden</p> <p>Formulah Perhitungan : Setiap sebulan sekali akan dilakukan pengisian kuesioner Penilaian kinerja (oleh Pimpinan OPD) di Website Badan Penghubung berupa (tabel skala Indeks) Juga pelaksanaan kegiatan langsung (tempat kegiatan) dengan menggunakan angket penilaian kepuasan Pelayanan Pimpinan yang diakumulasi setiap bulannya yang menjadi realisasi target tahunan (skala indek)</p>			
		Persentase Respon Positif Pelayanan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Ibu Kota Negara (Satuan: %)	Jumlah Pelayanan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Bagi Jumlah Yang dilayani	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Alat ukur keberhasilan capaian yaitu Terlayannya Pelayanan Masyarakat Jumlah Target Pelayanan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Yang dilayani x100 Jumlah Pelayanan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Yang dilayani</p>			

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)					
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat					
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien					
Badan Penghubung					
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
		Indikator Kegiatan :			
1.		Terselenggaranya Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan di Ibu kota Negara dan Jabodetabek (satuan : Kali)	Untuk pencapaian Indikator Kegiatan Meliputi: Promosi di Ibukota Negara, Investasi Provinsi Banten di Ibu Kota Negara, Menunjang Koordinasi di Ibu kota Negara. 3 (tiga) Jumlah indikator sebagai capain program	Σ <i>Target Kegiatan Promosi, Inevstasi dan Dokumen Informasi dengan Mitra Strategis</i>	Kasubbid Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan
2.		Terselenggaranya Pelayanan Masyarakat Banten di Ibu Kota Negara dan Jabodetabek, (Satuan: Kegiatan)	Untuk pencapaian Indikator Kegiatan Meliputi: Pelayanan Masyarakat Banten di Ibukota Negara dan Pelayanan Mehasiswa 2 (dua) Indikator sebagai Jumlah Target capaian indicator Program	Σ <i>Target Kegiatan Pelayanan Masyarakat dan Mahasiswa Banten di Ibukota Negara dan Jabodetabek</i>	Kasubid Pelayanan Masyarakat
3.		Terlayanannya Penyelenggaraan Pemda di Ibu Kota Negara dan Jabodetabek (Satua : Laporan	Untuk pencapaian Indikator Kegiatan Meliputi: Layanan Penyelenggaraan Pemda (Pimpinan) di Ibukota Negara, Jabodetabek dan Pengelolaan Wisma Banten.	Σ <i>Target Kegiatan Layanan Penyelenggaraan Pemda dan Pengelolaan Wisma</i>	Kasubid Penyelenggaraan Pemda

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)					
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat					
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien					
Badan Penghubung					
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
			Jumlah Layanan dan Pendapatan sebagai target capaian indikator		

Jakarta, November 2019

BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI BANTEN
Pit. Kepala



Ir. TRIASGANI PURBASARI, MM
Pembina (IV/a)
NIP.19631124 200112 2 001



PROVINSI BANTEN
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD
PERIODE : 2017-2022

SATKER : 300105 Badan Penghubung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan					
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
Meningkatnya suport dukungan Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan Masyarakat di Ibukota Negara	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	3 Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	3001.11	Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Penghubung	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	2.5 Skala	2,80		3,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	(Jml dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang sesuai parameter)/(Jml dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang disusun) x 100 %			
					2 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00				100,00		
					3 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00				100,00		(Jml Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran)/(Jml Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran yang tersedia) x 100 %
					4 Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00				100,00		(Jml Aparatur yang mendapat sertifikat pada tahun n)/(Jml Aparatur yang mengikuti pelatihan pada tahun n) x 100 %
					5 Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00				100,00		(Jumlah Laporan yang sesuai SAP)/(Jumlah dokumen laporan) x 100 %
			3001.300105.00.11.001	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	8 Dokumen	8,00	37.505.000,00	8,00	23.440.000,00	8,00	50.038.000,00	8,00	63.000.000,00	8,00	66.150.000,00	32,00	240.133.000,00	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang tepat waktu	Jumlah Dokumen laporan keuangan sesuai target tahunan			
					2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2 Dokumen	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00				Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) sebanyak 2 dokumen dari 2 semester		
					3 Penyusunan Dok Laporan Pajak	3 Dokumen	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		15,00				Jumlah Dok Laporan Pajak sesuai standar aturan dari target 3 dokum		
			3001.300105.00.11.002	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	3 Dokumen	3,00	51.620.400,00	3,00	45.607.000,00	3,00	261.474.656,00	3,00	222.048.389,00	3,00	233.150.808,50	15,00	813.901.253,50	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi Program Kegiatan Sesuaiin Kaidah Perencanaan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Program Kegiatan sesuai target tahunan 3 dokumen			
					2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9 Dokumen	9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00				Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan sesuai dengan target tahunan 9 dokumen		
					3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4 Dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		24,00				Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian sesuai target tahunan 4 dokumen		
					4 Penyusunan Renstra	1 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00				Jumlah Renstra sesuai target dalam 5 tahun yaitu 1 dokumen		
					5 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Sektor Penghubung	6 Dokumen	0,00		0,00		6,00		6,00		6,00		30,00				Jumlah Data Pembangunan Sektoral 6 Dokumen dari Target		
			3001.300105.00.11.003	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	1,00	188.750.000,00	1,00	163.651.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	352.401.500,00	Tersediannya Sarana Prasarana Kantor sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM)D	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perengkapan dan Peralatan Kantor				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			3001.300105.00.11.004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor dan Anjungan Banten	1 Tahun	1,00	459.555.000,00	1,00	449.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	908.999.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD)	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor dan Anjungan Banten
					2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1 Tahun	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
					3 Pemeliharaan Inventaris Kantor	1 Tahun	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			Jumlah Pemeliharaan Inventaris Kantor
			3001.300105.00.11.005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1 Operasional kantor Tidak tetap	1 Tahun	1,00	1.518.647.800,00	1,00	1.554.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3.073.115.800,00	Tersediannya Barang dan Jasa Perkantoran	
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	1 Tahun	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					3 Penyediaan Bahan Cetak	1 Tahun	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	1 Tahun	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	1 Tahun	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	1 Tahun	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					7 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo	1 Tahun	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					8 Penyediaan BBM	1 Tahun	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
			3001.300105.00.11.006	Peningkatan Kapasitas Aparatur	1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	15 Dokumen	15,00	27.985.000,00	15,00	34.889.000,00	10,00	68.946.000,00	10,00	160.000.000,00	10,00	168.000.000,00	60,00	459.820.000,00	Terseleenggarannya Peningkatan Kapasitas Aparatur sesuai Standar Aturan ASN	Jumlah Fasilitasi Administrasi Kepegawaian
					2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	3 Dokumen	3,00		3,00		4,00		4,00		4,00		20,00			Jumlah Peningkatan Kompetensi Aparatur
			3001.300105.00.11.007	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	1 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	12 Kegiatan	12,00	993.280.000,00	12,00	558.037.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1.551.317.500,00	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi kedalam dan Keluar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi kedalam dan Keluar Daerah
			3001.300105.00.11.008	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	54.770.000,00	2,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	204.770.000,00	Tersediannya Data Pembangunan Sektoral sesuai data perencanaan	Jumlah Profil Kinerja Program Perangkat Daerah dari target 2 dokume
					2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			Jumlah Data Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik sesuai target 2 dokumen
					3 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik	2 Dokumen	0,00		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00			Jumlah Data Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik sesuai target 2 dokumen
					4 Pengelolaan PPID	1 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			Jumlah Pengelolaan PPID Badan Penghubung 12 bulan dengan target 1 dokumen
					5 Pengelolaan PPID	1 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat usia hasil survey dalam satu tahun dengan target 1 dokumen
			3001.300105.00.11.009	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	1 Penyediaan Barang Jasa Perkantoran	12 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3.026.016.000,00	12,00	2.810.921.611,00	12,00	2.788.669.191,50	36,00	8.625.606.802,50	Tersediannya Barang Jasa, Tersediannya Sarana Prasarana dan Terpeliharanya Sarana Prasarana Perkantoran yang sesuai standar	Jumlah Penyediaan Barang Jasa Perkantoran sesuai kebutuhan selama 12 kegiatan
					2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Kegiatan	0,00		0,00		12,00		12,00		12,00		36,00			Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor sesuai Standar dan RKBMD yang sesuai target
					3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Kegiatan	0,00		0,00		12,00		12,00		12,00		36,00			Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar dan sesuai RPBMD yang sesuai target 12 kegiatan
					4 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	12 Kegiatan	0,00		0,00		12,00		12,00		12,00		36,00			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah sesuai target 12 kegiatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
Meningkatnya suport dukungan Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan Masyarakat di Ibukota Negara	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung	1 Capaian Pelayanan Publik	3001.16	Program Pembangunan Kemitraan	1 Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis	100 %	100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00		Meningkatnya Pelayanan Publik di Ibu Kota Negara					
					2 Indeks Respon Positif Stakeholder Terhadap Informasi Pembangunan di Ibu Kota Negara	0 Indeks	0,00		0,00		4,00		4,00		4,00		4,00				4,00			
					3 Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan di Ibu Kota Negara dan di Wilayah Jabodetabek	0 Indeks	0,00		0,00		4,00		4,00		4,00		4,00				4,00		4,00	
					4 Persentase Respon Positif Pelayanan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Ibu Kota Negara	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00				100,00		100,00	
			3001.300105.00.16.001	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Pelayanan Pimpinan, pejabat Pemda, pusat dan tamu dalam rangka Koordinasi, Raker dan Kunker	180 Kegiatan	180,00	170.156.800,00	180,00	440.690.000,00	12,00	724.366.600,00	12,00	462.724.500,00	12,00	485.860.725,00	36,00	2.283.798.625,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sesuai standar aturan/SOP	Jumlah Pelayanan Pimpinan dilakukan 12 bulan yaitu 12 laporan				
					2 Pelayanan Pimpinan, pejabat Pemda, pusat dan tamu pada Event Nasional, Internasional dan Kegiatan MPU, APPSI serta lainnya	24 Laporan	24,00		24,00		0,00		0,00		0,00		24,00			Jumlah Pelayanan Pimpinan, pejabat Pemda, pusat dan tamu pada Event Nasional, Internasional dan Kegiatan MPU, APPSI serta lainnya				
					3 Pelayanan dan Pengelolaan Wisma Banten	1 Kegiatan	1,00		1,00		12,00		12,00		12,00		36,00			Jumlah Pelayanan Wisma Banten dengan target wisma 12 laporan				
			3001.300105.00.16.002	Pelayanan Masyarakat	2 Sarasehan Masyarakat Banten se Jabodetabek	1 Dokumen	1,00	229.220.000,00	1,00	347.396.000,00	0,00	547.396.000,00	0,00	295.000.000,00	0,00	319.525.586,00	1,00	1.738.537.586,00	Terlayannya Masyarakat Banten di Ibukota Negara sesuai standar aturan/SOP	Jumlah Sarasehan Masyarakat Banten se Jabodetabek sebagai Rekomendasi dan sebagai bahan perencanaan dan Laporan				
					3 Pengembangan potensi Mahasiswa asal Banten	4 Dokumen	4,00		4,00		0,00		0,00		0,00		4,00			Jumlah Pengembangan potensi Mahasiswa asal Banten sebagai bahan Pembinaan dan Perencanaa				
					4 Rakor Mahasiswa asal Banten	1 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			Hasil Pengembangan potensi Mahasiswa asal Banten sebagai bahan Pembinaan dan Perencanaa				
					5 Pelayanan Terhadap Masyarakat Banten di Jakarta	120 Dokumen	120,00		120,00		0,00		0,00		0,00		12,00			Jumlah Pelayanan Terhadap Masyarakat Banten di Jakarta				
					6 Pelayanan Masyarakat Banten di Ibu Kota Negara	12 Kegiatan	0,00		0,00		12,00		12,00		12,00		36,00			Jumlah Pelayanan Masyarakat Banten di Ibu Kota Negara sesuai standar aturan/SOP selama 12 bulan dengan target 12 dokumen				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			3001.300105.00.16.003	Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan	1 Pentas Seni Budaya Banten di Jabodetabek	3 Kegiatan	3,00	954.080.000,00	2,00	1.368.377.000,00	0,00	1.863.662.744,00	0,00	1.485.005.500,00	0,00	1.437.343.680,00	2,00	7.108.468.924,00	Terselenggaranya Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan di Ibukota Negara	Jumlah Pentas Seni Budaya Banten di Jabodetabek sesuai target 3 Event
					2 Partisipasi Dalam Rangka HUT Banten	1 Kegiatan	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Jumlah Partisipasi Dalam Rangka HUT Banten sesuai target 1 Event	
					3 Pentas Seni dan Promosi di Event Nasional & Regional	2 Kegiatan	2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Jumlah Pentas Seni dan Promosi di Event Nasional & Regional	
					4 Partisipasi Pekan Raya Jakarta di JIExpo	0 Kegiatan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Jumlah Partisipasi Pekan Raya Jakarta di JIExpo	
					5 Pengelolaan Media Informasi dan Publikasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten	4 Kegiatan	4,00		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Jumlah Pengelolaan Media Informasi dan Publikasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten	
					6 Bulan Promosi 8 Kabupaten/Kota di TMII	5 Kegiatan	4,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Jumlah Penyelenggaraan Bulan Promosi 8 Kabupaten/Kota di TMII	
					7 Pelestarian Seni Budaya Banten di Anjung	12 Kegiatan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00		Jumlah Pelestarian Seni Budaya Banten di Anjung	
					8 Penunjang Kegiatan Kantor dan Anjung	12 Kegiatan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00		Jumlah Penunjang Kegiatan Kantor dan Anjung selama 12 bulan	
					9 Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII	7 Kegiatan	7,00		4,00		0,00		0,00		0,00		4,00		Jumlah Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII	
					10 Pentas Seni Budaya dan Kerjasama Promosi	1 Kegiatan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Jumlah Pentas Seni Budaya dan Kerjasama Promosi	
					11 Layanan Forum Bisnis	1 Kegiatan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		Jumlah Layanan Forum Bisnis	
					12 Promosi di Ibukota Negara	15 Kegiatan	0,00		0,00		15,00		15,00		15,00		45,00		Jumlah Partisipasi Anjungan Daerah di TMII	
					13 Investasi di Ibukota Negara	2 Kegiatan	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Jumlah Investasi di Ibukota Negara sesuai target 2 Kegiatan	
					14 Koordinasi Urusan Pemerintah dan Pembangunan di Ibukota Negara	3 Kegiatan	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		9,00		Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintah dan Pembangunan di Ibukota Negara dari 12 bulan sesuai target 3 kegiatan	

SERANG

Pt. Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten



Ir. Triasgani Purbasari, MM

MISI 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR		KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB	
			SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	2016	2018	2019	2020	2021	2022			
Tujuan : Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompentensi serta melayani masyarakat				Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	2,8	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	SEKRETARIS DAERAH	
					Indeks Ketahanan Daerah								
Sasaran : Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetaikannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	CC	B	BB	BB	BB	BB	BB	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
					Capaian Indeks Reformasi Birokrasi								
Program Tata Kelola Pemerintahan			Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	CC	B	BB	BB	BB	BB	BB	Seluruh Kepala OPD	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	2,8	3,1	3,2	0	0	0	3,5	Program diampu oleh sekretaris dinas/badan/Kepala kantor/UPTD/Balai/KCD dan Kabag yang membidangi Tata usaha pada biro)
Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	0	0	0	100	100	100	100						
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	0	0	0	100	100	100	100						
Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	0	0	0	100	100	100	100						
Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	0	0	0	100	100	100	100						
BADAN PENGHUBUNG													
Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung	Meningkatkan Fasilitas, Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan	Peningkatan Koordinasi, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung	Capaian Pelayanan Publik	100	100	100	100	100	100	100	100	Kepala Badan Penghubung
Program Pembangunan Kemitraan			Meningkatnya Koordinasi terhadap Mitra Strategis	Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis	100	100	100	100	100	100	100		
SEKERTARIAT DPRD													
Sasaran : Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Meningkatkan Fasilitasi Tugas dan Fungsi Anggota DPRD	Peningkatan Pelayanan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD	Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretaris DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah Provinsi	Capaian % Kinerja Fungsi DPRD	0	100	100	100	100	100	100	100	Kepala Bagian Hukum dan Persidangan
					Meningkatnya Koordinasi Penanganan Bencana	0	100	100	100	100	100	100	Kepala Bagian Aspirasi dan Humas
					Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	0	100	100	0	0	0	0	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH													
Sasaran : Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan aset daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan RAPBD dan RPAPBD Provinsi Banten yang tepat waktu				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Kepala Bidang Anggaran	
			Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan	Persentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan	75	80	85	90	95	100	100	Kabid Perbendaharaan	

Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah			Meningkatnya kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintah	70	80	90	100	100	100	100	Kepala Bidang Akuntansi		
Program Penatausahaan Aset Daerah			Meningkatnya tertib administrasi aset daerah	Capaian tertib Administrasi Aset daerah	100	100	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Aset Daerah		
INSPEKTORAT														
Sasaran : Meningkatkan Kualitas SPIP	- Meningkatkan Nilai SAKIP - Meningkatkan Maturitas SPIP - Meningkatkan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan - Meningkatkan dan Mempertahankan Opini Laporan Keuangan	- Peningkatan Capaian Nilai SAKIP - Peningkatan Capaian Maturitas SPIP - Peningkatan Peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah - Peningkatan Capaian Opini Laporan Keuangan	Meningkatnya Kualitas SPIP	Capaian Maturitas SPIP	2	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	Inspektur		
Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Meningkatnya kualitas pengawas Internal	Persentase Laporan keuangan SKPD sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)								Inspektur Pembantu I		
				Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti / dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan : APIP dan BPK RI									Inspektur Pembantu II, III & IV	
				Persentase tindak lanjut APIP dan BPK RI selesai										Inspektur Pembantu IV
				Persentase penyelesaian kasus-kasus/pengaduan masyarakat										
			Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai hasil PMPRB										
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														
Sasaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	60,00	65	70	75	80	80	80	Kepala Bappeda		
Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah				Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi	30	50	60	70	80	90	90	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan			Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program pembangunan	Persentase dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	100	100	0	0	0	0	0	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan		
				Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	100	100	100	100	100	100	100			
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	70	80	85	0	0	0	85			
				Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan KTRW	50	70	75	0	0	0	75			
				Tingkat kesesuaian pelaksanaan program Perencanaan Pembangunan	0	0	0	75	80	85	85			
				Tingkat Ketersediaan Pembiayaan Non-APBD										
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi			Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian Kegiatan pembangunan Mitra Bidang Perekonomian	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	50	70	75	80	85	90	90	Kepala Bidang Perekonomian		
				Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Sosial dan Perekonomian	0	0	0	75	80	85	85			
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan			Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian Kegiatan pembangunan Mitra Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	50	70	75	80	85	90	90	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan		
				Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Sosial dan Pemerintahan	0	0	0	75	80	85	85			
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian Kegiatan pembangunan Mitra Bidang IPW	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	50	70	75	80	85	90	90	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		
				Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang IPW	0	0	0	75	80	85	85			

			Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	0.00	0.00	0.00	2.80	3.00	3.20	3.20		
			Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande (%)	0.00	0.00	0.00					0.00	
			Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	0.00	0.00	0.00	2.80	3.00	3.20	3.20		
			Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bantoregeng (%)	0.00	0.00	0.00					0.00	
			Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bantoregeng	0.00	0.00	0.00	2.80	3.00	3.20	3.20		
			Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Panolaschituang (%)	0.00	0.00	0.00					0.00	
			Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Panolaschituang	0.00	0.00	0.00	2.80	3.00	3.20	3.20		
			Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingsing (%)	0.00	0.00	0.00					0.00	
			Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingsing	0.00	0.00	0.00	2.80	3.00	3.20	3.20		
			Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat (%)	0.00	0.00	0.00					0.00	
			Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	0.00	0.00	0.00	2.80	3.00	3.20	3.20		
			Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong (%)	0.00	0.00	0.00					0.00	
			Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	0.00	0.00	0.00	2.80	3.00	3.20	3.20		
			Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja (%)	0.00	0.00	0.00					0.00	
			Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	0.00	0.00	0.00	2.80	3.00	3.20	3.20		
			Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol (%)	0.00	0.00	0.00					0.00	
			Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	0.00	0.00	0.00	2.80	3.00	3.20	3.20		
			Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug (%)	0.00	0.00	0.00					0.00	
			Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	0.00	0.00	0.00	2.80	3.00	3.20	3.20		
			Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon (%)	0.00	0.00	0.00					0.00	
			Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	0.00	0.00	0.00	2.80	3.00	3.20	3.20		
			Meningkatnya Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	62.89	59.30	60.62	61.91	63.19	64.44	64.44	Kepala Bapenda
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah			Meningkatnya Inovasi Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan jumlah wajib pajak (%)	0.00	0.00	0.00					Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah
				Persentase Peningkatan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	- Subbid Perencanaan PD - Subbid Pengembangan PD - Subbid Regulasi dan Kerjasama PD
				Persentase peningkatan jumlah wajib retribusi (%)	0.00	0.00	0.00					
				Meningkatnya Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pusat data dan Aplikasi Pendapatan Daerah (%)	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00

			Meningkatnya kemampuan aparaturnya yang berkompeten dan terpercaya	Persentase penurunan temuan SPI antar Tahun Anggaran (%)	0.00	0.00	0.00	90.00	80.00	70.00	70.00	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah - Subbid Pemeriksaan dan Pengendalian PD - Subbid Pembinaan dan Kepatuhan - Subbid Monitoring, Evaluasi dan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												
Sasaran : Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta ketentraman dan ketertiban umum daerah	Penegakan Peraturan daerah yang mendukung pelayanan publik dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum daerah	Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta ketentraman dan ketertiban umum daerah	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	70,00	75	75	80	80	85	85	Kepala Satpol PP
Program Ketentraman dan Ketertiban Umum			Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah Provinsi	cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	100	100	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah			Meningkatnya Pengakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	70	75	75	80	80	85	85	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
Program Perlindungan Masyarakat			Meningkatnya Penanganan Perlindungan Masyarakat	Cakupan perlindungan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas
Program Penanganan Bencana Kebakaran			Meningkatnya Koordinasi Penanganan Bencana	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	100	100	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
Sasaran : Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	- Meningkatkan Wawasan Kebangsaan - Meningkatkan keamanan dan stabilitas daerah	- Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan - Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	68,46	70	74	76	78	80	80	Kepala Badan Kesbangpol
				Penanganan konflik masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	
Program Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			Meningkatnya Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kbangsaan	Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI	5	22	24	27	29	33	33	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional			Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dari Gangguan Keamanan	Persentase penurunan peristiwa gangguan keamanan dalam daerah	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Bidang Kewaspadaan Nasional
Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi			Meningkatnya Ketahanan Sosial dan Ekonomi melalui pembinaan pada Ormas	Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan	70	70	70	75	75	75	75	Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi
Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat			Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	angka pemilu/pemilukada	70.83			76	0	80	80	Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik
				Angka Partisipasi Pilgub	62.78	0	0	0	0	0	0	
				Angka Partisipasi Pilpres	68.66	0	70	0	0	0	70	
				Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota	56.67	65	0	0	0	0	65	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH												
Sasaran : Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	- Meningkatkan Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana - Meningkatkan Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana - Meningkatkan Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana	- Peningkatan koordinasi penanggulangan kebencanaan - Peningkatan Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana - Peningkatan Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana	Tercapainya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Resiko Bencana	133,00	133	125	120	115	110	110	Ka. BPBD
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana			Meningkatnya cakupan mitigasi dan pengurangan resiko bencana	Cakupan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	100	100	100	0	0	0	100	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Meningkatnya Upaya Pencegahan dan kesiapsiagaan pengurangan resiko Bencana	Persentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana		100						
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana			Meningkatnya ketersediaan peralatan dan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana	100	100	100	0	0	0	100	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

			Meningkatnya ketersediaan logistik dalam penanganan darurat bencana	Presentase penanganan darurat bencana									
				Presentase bantuan logistik dan dukungan peralatan penanggulangan bencana									
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana			Terwujudnya pemulihan kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana	Presentase Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana	100	100	100	0	0	0	100		Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
				Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	Presentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi								
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA													
Sasaran : Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk administrasi Kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan Berskala Provinsi yang Akuntabel	Capaian Tertib Administrasi Kependudukan	50	80	80	85	90	95	95		Kepala DP3AKB
Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil			Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Rasio bayi berakte kelahiran	60	64.86	67.38	69.49	71.24	72.7	72.7		Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
				Rasio Pasangan berakte nikah	20	23.33	30.81						
					12.91		22.77	24.9	26.91	26.91			
				Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK Rasio Kepemilikan KTP-el	87.52	90.49	92.33	92.7	93.63	98.47	98.47		
				Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	77	79.19	80.99	82.49	83.74	84.79	84.79		
				Cakupan data dan informasi kependudukan	0	100	100	100	100	100	100		
				Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan				31.25	34.25	34.25	34.25		
									35	40	40		
BIRO PEMERINTAHAN													
Sasaran : Kerjasama dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terwujudnya implementasi kerjasama pemerintahan										Kepala Biro
Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan			Terumuskannya Kebijakan Pemerintahan	Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan	65	70	75	0	0	0			
				presentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan				100	100	100	100		
				presentase realisasi kebijakan administrasi kewilayahan				100	100	100	100		
				presentase realisasi kebijakan administasi pemerintahan dan otonomi daerah				100	100	100	100		
BIRO HUKUM													
Sasaran : Kualitas Produk Hukum Daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah	Peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan peraturan perundangan daerah	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Presentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yang terpublikasi	100	100	100	100	100	100	100		Kepala Biro
Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum			Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum	Persentase realisasi target prolegda presentase realisasi target propemperda	100	100	100	100	100	100	100		Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan
				Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional	70	75	80	100	100	100	100		
				Presentase Fasilitasi keselarasan peraturan perundangan daerah Kabupaten/ Kota dengan regulasi hukum nasional	50	70	80	100	100	100	100		
				Persentase Raperda inisiatif yang memiliki naskah akademik	100	100	100	100	100	100	100		
				Presentase Raperda yang memiliki naskah akademik									
				presentasi pelayanan bantuan hukum dan HAM	100	100	100	100	100	100	100		Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

				Persentase Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum	100	100	100	100	100	100	100	Kepala Bagian Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum	
BIRO ORGANISASI													
Sasaran : Tatalaksana Orgnisasi Daerah Yang Efektif	Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan	Terwujudnya tatalaksana orgnisasi yang baik	Persentase capaian Lakip	CC	B	BB	BB	A	A		Kepala Biro	
Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan			Meningkatnya Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	persentase ketercapaian kebijakan penataan kelembagaan	0	0	0	100	100	100	100	Kepala Bagian Kelembagaan	
				persentase ketercapaian dokumen ketatalaksanaan yang berkualitas	0	0	0	100	100	100		Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	
				Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B	10	30	50	0	0	0			
				persentase tercapainya akuntabilitas kinerja aparatur dan LKIP	0	0	0	100	100	100		Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	
BIRO UMUM													
Sasaran : Pelayanan Umum yang Prima	Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat daerah	Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan daerah	Terseleenggaranya pelayanan umum dilingkungan setda									Kepala Biro	
Program Pelayanan Umum			Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah				100	100	100	100	Kepala Bagian Tata Usaha	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah				100	100	100	100		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Setda				100	100	100	100		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Setda				100	100	100	100	Kepala Bagian Keuangan Setda	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik	100	100	100				100	Kepala Bagian Perlengkapan	
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT													
Sasaran : Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Tersusunnya kebijakan kesejahteraan rakyat									Kepala Biro	
Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra	70	75	80	85	90	90	90	Kepala Bagian Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	
				Persentase kebijakan di bidangyang terimplementasikan									Kepala Bagian Sosial dan Agama
BIRO ADMINISTRASI RUMAH TANGGA PIMPINAN													
Sasaran : Pelayanan dan fasilitas Pimpinan	Meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan	Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan	Tercapainya Pelayanan dan Fasilitas Pimpinan									Kepala Biro	
Program Fasilitas dan Pelayanan Pimpinan			Meningkatnya kualitas pelayanan pimpinan	Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	70	75	80	85	90	90	90	Kepala Bagian Rumah Tangga	
				Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan	70	75	80	85	90	90	90	Kepala Bagian TU Pimpinan	
				Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokol	70	75	80	85	90	90	90	Kepala Bagian Protokol	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA													

Sasaran : Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Mengurangi jumlah desa tertinggal	Peningkatan Penataan, pembinaan dan pengembangan Desa melalui Penataan dan Pembinaan Desa Adat serta Pembinaan Kelembagaan dan kesadaran desa	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang diberdayakan					100	100	100	100%	Kepala Dinas Pemdes
			Meningkatnya status desa berkembang menjadi mandiri	Persentase Desa Mandiri	14	16,4	18,8						
Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan			Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan	Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang	158	2	2						Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
				Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri	1,022.00	2	2						
				Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi Masyarakat yang di berdayakan				100	100	100	100%		
				Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi Masyarakat yang di berdayakan				100	100	100	100%		
Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik	100%	44	44	100	100	100	100%		Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
				Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan desa yang diberdayakan		100	100						
Program Bina Pemerintahan Desa/kelurahan			Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan	Cakupan Kerjasama Desa yang meningkatkan Jumlah Desa Mandiri	100%	2	2	100	100	100	100%		Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama desa
				Persentase Peningkatan Pendampingan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan yang diberdayakan		100	100						
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN													
Sasaran : Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukaan Informasi	Meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi	Peningkatan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	Meningkatnya pelayanan Pemerintahan berbasis elektronik	Persentase Sarana dan Prasarana Persandian					100	100	100	100	Kepala Diskominfo
				Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88,08	88,08	89	89,55	90	90	90		
Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik			Meningkatnya pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	10	20	40	60	80	100	100		Kepala Bidang Statistik, Persandian, informasi dan Komunikasi Publik
Program Tata Kelola Persandian			meningkatnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi				60	80	100	100		Kepala Bidang Statistik, Persandian, informasi dan Komunikasi Publik
Sasaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas			Meningkatnya Kualitas Data Sektoral Daerah	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dok Perencanaan Daerah	60,00	65	70	75	80	80	80		Kepala Bidang Statistik, Persandian, informasi dan Komunikasi Publik
Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah			Tersedianya Data Sektoral Pembangunan Daerah	Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi				70	80	90	90		Kepala Bidang Statistik, Persandian, informasi dan Komunikasi Publik
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													
Sasaran : Administrasi pembangunan daerah	Meningkatkan kinerja Administrasi Pembangunan	Peningkatan kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan	Tercapainya layanan dan pembangunan administrasi daerah										Kepala Biro
Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan			Meningkatnya Layanan Administrasi Pembangunan	Persentase keselarasan kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	70	75	80	85	90	90	90		Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data
													Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
				Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa				85	90	90	90		Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH													

					Perentase operasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air pada WS Ciliman-Cisawarna														
Sasaran : Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Penataan Ruang	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kualitas kesesuaian pemanfaatan ruang	Perentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80	82,5	85	87,5	90	92,5	92,5								Kepala DPUPR
			Meningkatnya kualitas penataan ruang	Perentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi Perentase Tersusunnya Perda Rencana Tata Ruang (RTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi	0	25	37,5	62,5	75	100	100								
				Perentase Kesesuaian Peminanaan Pemanfaatan Ruang				100	100	100	100								
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			
Sasaran : Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	- Meningkatkan penataan dan penatagunaan kawasan perumahan dan permukiman - Meningkatkan Sistem Tata Air Terpadu - Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat - Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan	- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional - Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat - Pembangunan TPST Regional - penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh	Meningkatnya perumahan dan pemukiman yang layak, ketersediaan air minum dan air limbah regional serta pengelolaan sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	375.29	114.6	203.2	274.6	333.3	375.29	375.29								Kepala DPRKP
				Perentase Rumah Layak Huni cakupan penyediaan pengelolaan sampah	82.86	84.02	85.18	86.34	87.5	88.66	88.66								
Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan			Meningkatnya kawasan Permukiman yang layak	Luas Kawasan Kumuh yang ditata	375.29	114.6	203.2	274.6	333.3	333.3	333.3								Kepala Bidang Kawasan Permukiman
				Perentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	82.86	84.02	85.18	86.34	87.5	88.66	88.66								Kepala Bidang Perumahan
			Meningkatnya Perumahan yang layak huni	cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman				33.33	33.33	33.33	100								Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman
Program Keciaptakaryaan			Meningkatnya prasarana penyediaan air minum, sanitasi lingkungan dan persampahan	Perentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum	71.05	72.75	76.15	81.24	88.04	96.53	96.53								
				Perentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi	67.94	72.86	75.57	79.19	83.71	90.03	90.03								
				cakupan penyediaan prasarana persampahan	0	0	20	20	20	20	20								
Sasaran : Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	meningkatkan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi	Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi	Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi yang Optimal	perentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	0	25	50	75	88	100	100								Kepala DPRKP
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan			Meningkatnya Sarana dan prasarana gedung Strategis Provinsi yang berkualitas	perentase penyediaan dan pengelolaan gedung strategis Provinsi	0	28	69	83	89	100	100								Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman
				perentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi				100	100	100	100								Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Strategis
DINAS PERHUBUNGAN																			
Sasaran : keselamatan dan kelancaran lalu lintas	- meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas - Meningkatkan sarana dan prasarana kelengkapan jalan - Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi	- Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi - Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan - Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi	Terwujudnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Perentase peningkatan pelayanan perhubungan darat, laut dan udara					100	100	100								Kepala Dishub
Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan transportasi	Perentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan	0	20	20	20	20	20	100								Kepala Bidang Pengembangan Transportasi
				Perentase wilayah yang terlayani angkutan umum	0	0	0	20	20	20	60								
			Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan transportasi	Perentase penyelenggaraan operasionalisasi prasarana perhubungan darat dan laut				50	50	100	100								Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			Meningkatnya Keterlibatan Lalu Lintas	Perentase pengaturan rekayasa lalu lintas	100	100	100	100	100	100	100								Kepala Bidang Lalu Lintas
				Perentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan	0	100	100	100	100	100	100								
Sasaran : Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Penyusunan Regulasi dan Pedoman Standar Pelayanan Transportasi	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Perentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	0	10	20	20	20	20	90								Kepala Dishub
i			Meningkatnya Sarana dan prasarana transportasi darat	Perentase kebutuhan terminal type B yang sudah terpenuhi	0	0	0	14.29	28.57	42.86	57.14								Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana
				Perentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal				10	10	10	30								
				Perentase ketersediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	10	10	20	20	20	20	90								
				Perentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana perkeretaapian	0	10	20	20	20	20	90								
Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara			Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan laut dan udara	Perentase pembangunan pelabuhan pengumpan regional	0	0	20	40	60	80	80								Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara
				Perentase penyelenggaraan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)		100	100	100	100	100	100								
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																			

Sasaran : Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Meningkatkan sapras kelistrikan dan EBT	Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang ketenagalistrikan	Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Rasio elektrifikasi	95.2	97	98	100	100	100	100	Kepala DESDM
Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan			Meningkatnya Pemerataan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan			Meningkatnya pelayanan pemanfaatan ketenagalistrikan	Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar	9.92	16.17	22.83	29.92	37.42	45.33	45.33	Kepala Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN												
Sasaran : Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sebesar 100%	Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dan Sumber daya manusia	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	0	2.6	3	3.6	3.9	4		Kepala Diskominfo
Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi			Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana teknologi informasi	Persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	12.41	30.26	48.38	67.31	85.08	100	100	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
				Persentase pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	12.41	30.26	48.38	67.31	85.08	100	100	Kepala Bidang Aplikasi dan tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik
BIRO BINA INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM												
Sasaran : Kebijakan Infrastruktur Daerah	Meningkatkan akses infrastruktur bagi masyarakat	Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktur bagi masyarakat	Tersusunnya kebijakan infratrstruktur daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah (Total 40 Kebijakan)	0	14.29	28.57	57.14	76.19	100.00	100.00	Kepala Biro
Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur			Tersedianya kebijakan di bidang infrastruktur	Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur	70	75	80	85	90	90	90	Kepala Bagian Bina Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
												Kepala Bagian Bina Infrastruktur ESDM
												Kepala Bagian Bina Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Persandian
			Tersedianya Rumusan Kebijakan Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Alam	Persentase Rumusan kebijakan di bidang infrastruktur Energi dan Sumber Daya Alam	0			16.67	33.33	66.67	66.67	Kepala Bagian Bina Infrastruktur ESDM
			Tersedianya Rumusan Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumusan kebijakan di bidang infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0			22.22	44.44	66.67	66.67	Kepala Bagian Bina PUPR, Permukiman
			Tersedianya Rumusan Kebijakan Infrastruktur Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Persandian	Persentase Rumusan kebijakan di bidang infrastruktur Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Persandian	0			50.00	66.67	83.33	83.33	Kepala Bagian Bina Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Persandian

MISI 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR		KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
			SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	2016	2018	2019	2020	2021	2022		
Tujuan : Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing				Indeks Pembangunan Manusia	70.96	71.77	72.2	72.64	73.11	73.59	73.59	SERETARIS DAERAH
				Index Gini / Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	0,39	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,37	
				Kemiskinan	5.42	5.13	5	4.87	4.74	4.6	4.6	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	8.92	8.45	8.2	7.95	7.68	7.4	7.4	
Sasaran : Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus			Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Harapan lama sekolah	12.7	13	13.5	14	14.5	15	15	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			meningkatnya daya beli masyarakat	Daya beli								
Sasaran : Tersedianya Lapangan Kerja bagi Masyarakat			Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja								
Sasaran : Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)			Meningkatnya kesetaraan dan kualitas gender	Indeks pembangunan gender (IPG)	91.39	91.67	91.95	92.23	92.51	92.79	92.79	
DINAS PENDIDIKAN												
Sasaran : Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	- Meningkatkan Akses Pendidikan dan penyediaan biaya operasional sekolah Menengah - Meningkatkan Mutu Pendidikan dan penyediaan biaya operasional sekolah Khusus	- Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan - Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas pendidikan dan inovasi budaya daerah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	71.13	72.9	74.67	76.45	78.22	80	80	Kadis Dindikbud
				Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah	57.21	58.77	60.33	61.88	63.44	65	65	
				Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan								
Program Pendidikan Menengah			Tercapainya kualitas dan Akses pendidikan SMA	Angka Putus Sekolah SMA	0.25	0.22	0.19	0.16	0.13	0.1	0.1	Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas
				Angka Kelulusan SMA	98.83	98.64	98.85	99.07	99.28	99.49	99.49	
				Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA	50.7	51.96	53.22	54.48	55.74	57	57	
				Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS	47.6	48.68	49.76	50.84	51.92	53	53	
				Persentase Lulusan SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi								
Program Pendidikan Menengah			Tercapainya kualitas dan Akses pendidikan SMK	Angka Putus Sekolah SMK	0.5	0.44	0.38	0.32	0.26	0.2	0.2	Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan
				Angka Kelulusan SMK	99.87	99.89	99.9	99.92	99.93	99.95	99.95	
				Nilai Rata-rata Ujian SMK	54.7	55.5	56.3	57.1	57.9	58.7	58.7	
				Persentase SMK yang menerapkan link and match	10	17	34	51	68	85	85	
				Persentase Sekolah yang Melakukan MoU Link and Match								
Program penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus			Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Putus Sekolah								Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Kelulusan								
				Nilai Rata-rata Ujian								
Program Pendidikan Khusus			Tercapainya kualitas pendidikan Sekolah Khusus	Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus	15	17	34	51	68	85	85	Kepala Bidang Pendidikan Khusus
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Tercapainya peningkatan kompetensi guru dan media pembelajaran	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK	56.23	56.98	57.74	58.49	59.25	60	60	Kepala Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan
				Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA	64.57	64.86	65.14	65.43	65.71	66	66	
				Persentase guru SMA yang bersertifikat	95.26	96.21	97.16	98.01	99.05	100	100	
				Persentase guru SMK yang bersertifikat	48.28	54.63	60.97	67.31	73.66	80	80	
Program Peningkatan Mutu Pembelajaran			Meningkatnya Capaian pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Akses dan Mutu Media Pembelajaran	10	20	30	40	50	60	60	Kepala UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan dan Kebudayaan							100	
Sasaran : Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	- Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan	- Revitalisasi museum, pengembangan taman budaya	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas pendidikan dan inovasi budaya daerah	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah	0	100	100	100	100	100	100	Kadis Dindikbud
Program Pelestarian Kebudayaan			Tercapainya pelestarian budaya Banten	Cakupan Pembinaan Organisasi Seni Budaya				95	100	100	100	Kepala Bidang Kebudayaan
				Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya				95	100	100	100	
				Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten	70	85	90				90	
				Cakupan organisasi kesenian (pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya)	70	85	90				90	
				Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karva Budaya	70	85	90				90	

				Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	0	85	90	95	100	100	100	
			Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya	0	85	90	95	100	100	100	
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA												
Sasaran : Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	- Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas - Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event	- Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya kualitas dan kuantitas peran pemuda dalam organisasi kepemudaan serta terciptanya wirausaha muda mandiri	Indeks Pembangunan Kepemudaan	0	10	20	30	40	45	45	Kepala Dispora
			Meningkatnya Prestasi Olahraga Benen	Indeks Pembangunan Olahraga	0	10	20	30	40	45	45	
Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan			Meningkatnya Pemuda dan Organisasi Pemuda Wirausaha Mandiri	Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri	70	75	80	85	90	100	100	Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
				Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi	0	75	80				80	
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga			Terwujudnya Pelayanan Pembinaan Olahraga yang Optimal	Cakupan Pelayanan pembinaan olahraga	50	70	75	80	85	85	85	Kepal IPT Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
				Cakupan Ketercakupan Fasilitas Olahraga	50	70	75				75	
Program Peningkatan Prestasi Olah Raga			Meningkatnya Dukungan Fasilitas Olahraga Beprestasi	Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional	50	75	80	85	90	100	100	Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga			Meningkatnya Pembinaan Atlet Olahraga Beprestasi	Cakupan pembinaan olahraga	60	75	80	85	90	100	100	Bidang Prestasi Olahraga
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA												
Sasaran : Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	- Meningkatkan pengarusutamaan gender pada semua sektor	- Peningkatan peran perempuan yang dapat meningkatkan partisipasi pendidikan, kualitas kesehatan serta peningkatan perekonomian keluarga	Meningkatnya kualitas kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68.74	69.54	70.34	71.14	71.94	72.74	72.74	Kepala DP3AKB
Program Pemberdayaan Perempuan				Cakupan Perencanaan Responsif Gender	50	50	55	59.17	62.64	65.53	67.94	
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	58.22	58.22	62.27	65.22	67.69	69.74	71.45	
				Proposi kursi yang di duduki perempuan di DPRD	18.82	20.59	21.47	20	20	20	20	
				Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender	70	75	75	82.5	87.5	100	100	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
				Indek Ketahan-Keluarga	65.19	66.66	67.62	68.58	69.4	70.1	70.1	
				Cakupan Perempuan Pelaku Industri Rumah yang Dibina				100	100	100	100	
				Cakupan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan				10	12	14		
Sasaran : Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	- Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	- Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan dan anak	0	3	3	1	1	1	9	Kepala DP3AKB
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak			Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Cakupan Perempuan dan anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas	67.73	52.58	52.25	51.87	51.44	50.39	50.39	
				Rasio KDRT	0	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	
				Cakupan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak anak	0	16.13	16.13	16.13	16.13	16.13	16.13	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
				Cakupan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	6.67	26.67	6.67	13.33	13.33	6.67	6.67	
				Cakupan Penyelenggaraan Pencegahan tindak pidana Perdagangan orang	6.67	2.58	2.58	3.87	5.16	6.45	6.45	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH												
Sasaran : Meningkatkan Budaya Literasi	- Meningkatkan Minat Baca masyarakat dengan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	- Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan penerapan teknologi informasi	Meningkatnya Minat dan Budaya Gemar Membaca	Persentase peningkatan minat baca masyarakat	25.1	30	35	40	45	50	50	Kepala DPAD
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			Meningkatnya minat baca masyarakat melalui Promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan Membangun sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan dan masyarakat umum	Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus	75	85	90	95	100	100	100	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan				Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan	70	75	80	85	85	85	85	Kepala Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan
DINAS SOSIAL												

Sasaran : Menurunnya PMKS		- Peningkatan pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan jaminan sosial, serta Penanganan Kelembagaan perawatan dan pengasuhan	Menurunnya PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	8.24	4.49	3.89	3.3	2.68	2.08	2.08	Kepala Disnosos
Program Rehabilitasi Sosial	- meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Miskin		Meningkatnya Rehabilitasi Masalah Sosial	Cakupan PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	1,429.00	573	608	663	718	723	723	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Program Pemberdayaan Sosial			Meningkatnya partisipasi sosial PSKS	Cakupan PSKS yang meningkat Partisipasinya sosial	1,624.00	1,505.00	1,520.00	1,483.00	1,483.00	1,483.00	1,483.00	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Updating Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS	100	100	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan	2,120.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
				Cakupan Keluarga miskin yang mendapatkan jaminan sosial	48,150.00	30,000.00	25,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin	Cakupan penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota	1,850.00	940	949					
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti			Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti	Cakupan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti				100	100	100	100	Kepala-UPTD-Perlindungan-Sosial UPTD Panti Perlindungan Sosial
Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Dalam Panti			Meningkatnya Pelayanan dan Perlindungan Sosial di dalam Panti		280	160	230	250	270	230	230	
				Cakupan Perlindungan Sosial di dalam Panti				100	100	100	100	
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI												
Sasaran : Tersedianya Lapangan Kerja bagi Masyarakat	- Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja	- Penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan meningkatkan layanan pencari kerja melalui pelatihan, pemagangan, kelembagaan dan akreditasi serta pembinaan produktifitas	Tersedianya Lapangan Kerja bagi Masyarakat	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	58.06	59.01	60.01	61.06	62.01	63.06	63.06	Kepala Disnakertrans
Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Capaian Produktivitas Tenaga Kerja	4.31	4.35	4.4	4.42	4.44	4.46	4.46	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri			Meningkatnya Pelatihan dan Kompetensi Kerja	Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja	1.25	1.25	1.26	1.27	1.28	1.28	1.28	Kepala Balai Latihan Kerja Industri

MISI 4 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR		KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
			SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2016		
Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan				Angka Harapan Hidup	69.46	69.8	70.1	70.4	70.7	71	70.96	SEKRETARIS DAERAH	
Sasaran : Meningkatnya Pelayanan kesehatan			Meningkatnya Pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	308	304	300	290	290	285	285	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
				Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	32	31	30	29	28	26	26		
DINAS KESEHATAN													
Sasaran : Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	- Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Keluarga	- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia	Derajat kesehatan masyarakat yang meningkat	Penurunan Jumlah Kematian Ibu								Kepala Dinkes	
				Penurunan Jumlah Kematian Bayi									
				Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan									
				Cakupan kab kota yg mencapai Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat									
Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat			Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	45	65	81	86	90	94	94	Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat	
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan									
				Persentase Stunting yang di tangani									
				Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat	50	55	60	75	80	90	90		
				Cakupan Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat									
Sasaran : Keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	- Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Masyarakat	- Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit	Derajat kesehatan masyarakat yang meningkat	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	75	90	100	100	100	100	100	Kepala Dinkes	
Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan			Tercapainya kualitas kapasitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat	Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan	75	90	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	
				Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (PKTP, FKRTL, Laboratorium)	45	65	81	86	90	94	94		
				Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat	10	20	35	50	75	90	90		
Program Pencegahan Pengendalian Penyakit			Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Persentase Pembanguan Rumah Sakit Banten Selatan	0	20	30	40	50	50	50	Kepala Bidang P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	
				Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan	60	75	85	90	95	100	100		
			Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kondisi kejadian luar biasa Provinsi	Angka Kesakitan									
				Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)									
				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa Provinsi									
Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian			Tercapainya pemenuhan SDM, obat dan sarana kefarmasian yang optimal	Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya	0	70	170	270	370	470	470	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian	
				Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	65	70	80	85	85	90	90		
				Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian	40	50	60	70	80	95	95		
Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah			Tercapainya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan	Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani	27	32	37	45	53	61	61	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat			Tercapainya kompetensi tenaga kesehatan dan SDM kesehatan	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKMKM	5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4		
Program Peningkatan Tenaga kesehatan dan SDM kesehatan			Tercapainya kompetensi tenaga kesehatan dan SDM kesehatan	Persentase tenaga kesehatan dan SDM kesehatan yang mendapat pelatihan								Kepala UPTD Pelatihan Kesehatan	
RSUD BANTEN DAN MALINGPING													
Sasaran : Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Perorangan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan dan kefarmasian	Derajat kesehatan masyarakat yang meningkat	BOR (Bed Occupancy Ratio).	0	60	65	70	75	80	80	Direktur	
				Persentase Pelayanan Rumah Sakit rujukan regional									
			Tercapainya SPM Pelayanan Medis dan Keperawatan	Capaian SPM Pelayanan Medis dan keperawatan RSUD Banten	70	70	70	75	75	85	85	Wakil Direktur Pelayanan	
			Tercapainya SPM Pelayanan Medis	Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten	88	88	88	88	90	93	93	Kepala Bidang Pelayanan Medis	

aktifitas fisik

SOTK Awal: 06-01-2019 SOTK Awal: 1. ...

		Tercapainya SPM Pelayanan Keperawatan	Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten	70	70	70	75	75	85	85	Kepala Bidang Keperawatan	SOTK Awal: -	
		Terpenuhi standar sarana dan prasarana penunjang	Capaian SPM standar sarana dan prasarana penunjang	70	70	75	80	85	90	90	Wakil Direktur Penunjang	SOTK Awal: Wakil	
		Tercapainya Kecukupan Logistik	Capaian Ketersediaan Logistik RSUD Banten								Kepala Bidang Logistik	SOTK Awal: Wakil	
		Terwujudnya Pengelolaan Rekam Medik secara digital	Pengelolaan Rekam Medik secara digital								Kepala Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	SOTK Awal: Kepala Bidang Rekam Medis	
		Tersedianya administrasi umum dan kepegawaian	Capaian pelayanan administrasi umum dan kepegawaian								Wakil Direktur Umum dan Keuangan		
			Persentase dokumen perencanaan yang dihasilkan								Kepala Bagian Umum		
			Pelatihan karyawan >20 jam /orang/tahun										
		Tercapainya standar indicator keuangan	Peningkatan akuntabilitas laporan keuangan								Kepala Bagian Keuangan		
		Tercapainya kualitas kapasitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit	Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping	30	40	50	50	100	100	100	Direktur		
			Capaian jumlah tempat tidur	-	-	-	0	100	0	200			
			Capaian pelayanan administrasi umum dan kepegawaian								Kepala Bagian Sekretariat		
			Persentase dokumen perencanaan yang dihasilkan										
			Pelatihan karyawan >20 jam /orang/tahun										
			Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Malingping	50	60	70	70	80	80	80	Kepala Bidang Pelayanan Medis		
		Tercapainya Kepuasan Pelayanan Medis	Persentase Kepuasan Pelayanan Medis	-	-	-	80	80	80	80			
			Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Malingping	70	70	70	75	75	85	85	Kepala Bidang Keperawatan		
		Kepuasan Pelayanan Keperawatan	Persentase Kepuasan Pelayanan Keperawatan	-	-	-	80	80	80	80			
		Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai	Capaian SPM standar sarana dan prasarana penunjang	70	70	75	80	85	90	90	Kepala Bidang Penunjang		
			Capaian jumlah tempat tidur	-	-	-	0	100	0	200			
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA													
	Sasaran : Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana		Meningkatnya kualitas akses layanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)	59	60.9	61	61.08	61.15	61.21	61.29	Kepala DP3AKB	
				Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen kependudukan				6.45	6.45	6.45	6.45		
			Tercapainya pemerataan pemahaman kesehatan penduduk dan KB	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)				7.74	9.03	10.32	10.32	Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Harus di buat
				Cakupan peserta KB Baru				0.02	0.03	0.03	0.03		
				Angka kelahiran total (total fertility rate/ TFR) per	2.4	2.33	2.29				2.29		
				Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contra	59	60.9	61				61		
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	10.3	10.26	10.18				10.18		
				Tingkat putus pakai kontrasepsi	2.6	2.53	25.18				25.18		

MISI 5 : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR		STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				2016	2018	2019	2020	2021		
Tujuan : Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal		Laju Pertumbuhan Ekonomi			5.26	6	6.2	6.4	6.7	7	7	SEKRETARIS DAERAH
Sasaran : Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan		Tingkat Inflasi			2.94	3.7	4.2	4	4	4	4	
Sasaran : Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan										
Sasaran : Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat	Meningkatnya Layanan Keuangan	Indeks Keuangan Inklusif										Asisten Pembangunan Dan Perekonomian
Sasaran : Meningkatnya Daya Saing Daerah	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia										
Sasaran : Pembangunan Rendah Karbon	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Emisi Rumah Kaca										
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU												
Sasaran : Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN)	Meningkatkan iklim investasi, dan Meningkatkan potensi investasi	Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku	52.3	46.3	60.8	65	69.3	73.9	73.9	Kepala DPMPSTP
		Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	Meningkatkan pelayanan melalui kemudahan perizinan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat	Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan	82.16	85.09	85.22	86.85	88.52	90.23	90.23	
Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	meningkatnya minat investasi di Provinsi Banten	Jumlah calon investor yang mendaftar			12.4	2500	2750	3000	3250	3500	3500	Kepala Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD
	Meningkatnya Kinerja BUMD	Jumlah Kerjasama BUMD				0	2	2	2	2		
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal	Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal			75	100	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Terwujudnya Standar Pelayanan Perizinan	Persentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan			100	100	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Pelayanan
Program Pengendalian Penanaman Modal	Meningkatnya Realisasi Potensi Investasi	Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi			16.96	17.03	17.09	17.15	17.22	17.28	17.28	Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN												
Sasaran : Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	LPE Sektor Perindustrian	Meningkatkan pengembangan sektor industri	Pengembangan perwilayahan Industri melalui pembentukan sentra industri Kecil pada kawasan dan luar kawasan industri	3.05	3.7	3.95	4.2	4.45	4.7	4.7	Kepala Disperindag
				Pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing								
				Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar								
				Pengembangan kualitas produk industri kecil								
Program Peningkatan Daya Saing Industri	Meningkatnya Produktifitas Industri, nilai tambah industri berbasis sumber daya alam, kapasitas teknologi industri dan kualitas SDM	Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah yang Mendapatkan Fasilitas Penguatan (menjadi indikator output)			0	20	20	20	20	20	20	Kepala Bidang Perindustrian
		Persentase Kerjasama SDM Berkompeterasi Industri yang Aktif (menjadi indikator output)			0	20	20	20	20	20	20	
		Jumlah Industri yang menyelenggarakan penyiapan SDM secara Link and Match						40	40	40	120	
		Persentase Pertumbuhan Produk Ekspor yang berbasis sumber daya alam dan atau Lokal			%							
	Meningkatnya Pelayanan Standarisasi dan Sertifikasi Produk Industri Kecil	Jumlah produk industri kecil berstandar dan bersertifikasi			1,200.00	200	200	200	200	200	2200	Kepala Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
	Meningkatnya Pelayanan Standarisasi dan Sertifikasi Produk Industri Kecil	Cakupan Pelayanan Standarisasi dan Sertifikasi Industri Kecil Menengah			1,200.00	200	200	200	200	200	2200	
Sasaran : Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	LPE Sektor Perdagangan	Meningkatkan Stabilitas Harga Komoditas penting dan strategis	Peningkatan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik melalui Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi dan sistem informasi komoditas penting dan strategis	3.82	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9	6.9	

				Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata									
Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Memantapkan Pengembangan Industri Pariwisata Daerah Dan Ekonomi Kreatif	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan			3,634,490.00	3,743,525.00	3,852,216.00	4,044,827.00	4,327,965.00	4,760,761.00	4,760,761.00		Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Pemasaran Produk Pariwisata	Meningkatnya jumlah wisatawan dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor jasa dan pariwisata PDRB	Jumlah Kunjungan Wisatawan Rata-Rata Lama Kunjungan			14,705,763.00	15,146,936.00	15,601,344.00	16,361,411.00	17,528,110.00	19,105,640.00	19,105,640.00		Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah tenaga kerja yang terlatih di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif			200	300	300	300	300	300	300		Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Jumlah Destinasi Wisata yang berkembang	Persentase Pengembangan Destinasi Wisata berbasis Sapta Pesona											Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH													
Sasaran : Kelembagaan-Koperasi-yang-aktif-dan-sehat													
Peningkatan Kualitas Koperasi													
	Peningkatan Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi	Meningkatkan koperasi aktif melalui penataan kelembagaan dan pengawasan,Pemberdayaan Koperasi, kemitraan strategis, pemanfaatan teknologi informasi	Kemudahan perizinan kelembagaan pembinaan dan pengawasan koperasi, untuk mencapai jumlah Pertumbuhan koperasi aktif dan sehat	NA	6	6	6	6	6	6	30	Kepala Dinkop-UKM
				Kemudahan akses inovasi produk, informasi teknologi dan pembiayaan bagi koperasi aktif									
Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Berkembangnya Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif			0	6	6	6	6	6	6		Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Bankable			0	6	6	6	6	6	6		Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi
Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan kelembagaan dan pengawasan koperasi. (Dalam DO harus Persentase)			0	6	6	6	6	6	6		Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
		persentase realisasi implementasi hasil pelatihan pemberdayaan koperasi . (Dalam DO harus Persentase)			0	6	6	6	6	6	6		Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi
		persentase realisasi implementasi hasil pelatihan Usaha Kecil. (Dalam DO harus Persentase)			0	1	1	1	1	1	1		Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
Sasaran : Usaha Kecil yang berdaya													
Usaha Kecil yang meningkat menjadi usaha menengah													
	Meningkatnya Omset Usaha Kecil	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil	Meningkatkan Akses permodalan dan layanan kredit, pendampingan dan pengembangan usaha serta mendorong terwujudnya kemudahan kepastian dan perlindungan usaha	Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor Usaha Kecil melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan	NA	1	1	1	1	1	1	5	Kepala Dinkop-UKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Berkembangnya Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain			NA	1	1	1	1	1	1	5	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN													
Sasaran : Lingkungan Hidup yang berkualitas													
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengendalian pengawasan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan limbah	43.67	44.17	44.67	45.17	45.67	46.17	46.17		Kepala DLHK
					43.67			50.87	51.83	52.79	52.79		
Proeram Peneendalian Pencemaran Linekungan Hidup	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dampak lingkungan, dan ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (satuan : %)			-	-	-	98	98	100	100		Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
		Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			203	52	60	68	76	78	334		

Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Capaian Produktivitas Tenaga Kerja			4.31	4.35	4.4	4.42	4.44	4.46	4.46	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Hubungan Industrial yang Harmonis	Capaian Hubungan Industrial			2.93	3.66	4.4	5.25	6.17	7.1	7.1	Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
		Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja			10	10	10	10	10	10	10	
		Capaian lamarinan Sosial Tenaga Kerja			9.49	9.51	9.53	9.54	9.55	9.56	9.56	
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja	Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja			2.92	2.98	3.04	3.1	3.11	3.13	3.13	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
		Cakupan Pengawasan Kondisi Lingkungan Kerja										
Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Capaian Kesempatan Kerja			14.95	15.25	15.55	15.86	16.18	16.5	16.5	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri	Meningkatnya Pelatihan dan Kompetensi Kerja	Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja			1.25	1.25	1.26	1.27	1.28	1.28	1.28	Kepala Balai Latihan Kerja Industri

		Operasional kantor Tidak tetap	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		
		Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		
		Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		
		Penyediaan Promosi dan Publikasi	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		
		Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		
		Penyediaan BBM	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		
Peningkatan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Aparatur		93 orang	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00		
		Peningkatan Kompetensi Aparatur	93 orang	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00		
		Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	15 orang	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah		12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		
		Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	60,00		
		Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	60,00		
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		
		Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		
		Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten	12 Bulan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		
Sasaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Dok Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dok Perencanaan Daerah	60,00	65	70	75	80	80	80	Kepala Bappeda	
Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah		Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi	30	50	60	70	80	90	90	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		Terpenuhinya Kebutuhan Data untuk Perencanaan Pembangunan Sesuai SIPD									
Kegiatan :											
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan		4 Dok	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi	
		Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Banten	2 Dok	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00		
		Analisis Statistik Sektoral dan Informasi geospasial tematik Provinsi banten	2 Dok	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program pembangunan	Persentase Dok perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	100	100	0	0	0	0	0	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan	
		Persentase Dok Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	100	100	100	100	100	100	100		
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	70	80	85	90	95	100	100		
		Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	50	70	75	75	80	85	85		
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan program Perencanaan Pembangunan	50	70	75	75	80	85	85		
		Tingkat Ketersediaan Pembiayaan Non-APBD									
Kegiatan :											
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	Tersedianya Dok Perencanaan dan Penganggaran		14 Dok	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	66,00		
		Penyusunan APBD	3 Dok	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00		
		Penyusunan APBD Perubahan	3 Dok	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00		
		Penyusunan RPJMD	1 Dok	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		

		Penyusunan Dok Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	4 Dok	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan
		Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten	4 Dok	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian Kegiatan pembangunan Mitra Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam Dok perencanaan	50	70	75	80	85	90	90	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Sosial dan Pemerintahan								
Kegiatan :										
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial	Tersedianya Dok Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang		6 Dok	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	30,00	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial	2 Dok	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	
		Rapat Penyusunan Dok (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial	4 Dok	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Tersedianya Dok Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan		6 Dok	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	30,00	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	2 Dok	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	
		Penyusunan Dok Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	4 Dok	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	
Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tersedianya Dok Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah		12 Dok	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	60,00	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
		Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan	4 Dok	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	
		Pengendalian Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	4 Dok	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	
		Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)	4 Dok	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan	Tersedianya Dok Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan		8 Dok	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	40,00	Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan
		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan	2 Dok	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	
		Penyusunan Dok Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan	4 Dok	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	
		Perencanaan Pembangunan Kerjasama Antar Daerah	2 Dok	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian Kegiatan pembangunan Mitra Bidang IPW	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam Dok perencanaan	50	70	75	80	85	90	90	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang IPW								

